



BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 2024



Disusun Oleh

**BAGIAN ORGANISASI SETDA
KAB. INHIL 2025**



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
INSPEKTORAT DAERAH

JALAN PANGERAN DIPONEGORO NO. 745 TELP. (0768)22909-FAX. (0768) 22140
TEMBILAHAN 29212

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tembilahan, 26 Maret 2025

Inspektur Daerah
Kabupaten Indragiri Hilir,

Budi N. Pamungkas, S.STP, M.Si, CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780418 199701 1 001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh.



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyelenggaraan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dapat disusun untuk memenuhi ketentuan yang berlaku.

Penyelenggaraan SAKIP dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban (Akuntabilitas) Kinerja berupa informasi kinerja berdasarkan perencanaan Kinerja strategis yang dituangkan di dalam dokumen

Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir perencanaan pembangunan menengah dan perencanaan Kinerja tahunan yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja di awal tahun. Keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja akan digunakan sebagai evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan Kinerja akan digunakan sebagai evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan Kinerja di masa yang akan datang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah bagian dari sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan salah satu perbaikan Kinerja yang harus dan terus dilakukan untuk membangun penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan terukur. Tujuan dari SAKIP ini adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan terpercaya. LKJIP juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi yang obyektif bagi pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder) dalam menilai capaian kinerja dan pertanggungjawaban Instansi Pemerintah guna meningkatkan Kinerja serta bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja ini masih belum sempurna untuk itu kritik dan saran konstruktif guna perbaikan Laporan di tahun mendatang sangat dibutuhkan, sehingga nantinya dapat menjadi masukan dalam memperbaiki kinerja kedepan, baik dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, maupun koordinasi pelaksanaannya. Besar harapan kami bahwa Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai informasi maupun evaluasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Atas peran aktif segenap jajaran aparat Pemerintah Daerah dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dukungan instansi lain serta masyarakat sehingga terlaksananya hasil evaluasi kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas penyelenggaraan SAKIP Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, kami mengucapkan terima kasih.

Tembilahan, Maret 2025


Bupati Indragiri Hilir

Herman

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 menyajikan informasi target dan capaian sasaran dan indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Kinerja pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir diukur berdasarkan penilaian terhadap indikator Kinerja sasaran strategis yang disusun sebagai mana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026. Penilaian dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target Kinerja menjadi tolok ukur dari keberhasilan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dari hasil analisis isu-isu strategis menghasilkan 11 (sebelas) sasaran strategis dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator-indikator ini ditetapkan pada setiap Sasaran Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026. Ikhtisar capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

Sasaran 1 : “Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat”, pada tahun 2024 dengan Indikator Indeks Kesehatan memperoleh capaian kinerja sebesar 107,47% .dengan prediket Sangat Tinggi

Sasaran 2 : “Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan Masyarakat”, pada tahun 2024 dengan indikator kinerja Indeks Pendidikan memperoleh capaian kinerja sebesar 100,17% dengan prediket sangat tinggi

Sasaran 3 : “Meningkatnya Pendapatan Masyarakat”, pada tahun 2024 dengan indikator Indeks Pengeluaran memperoleh capaian kinerja sebesar 102 % dengan prediket sangat tinggi

Sasaran 4 : “Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran”, pada tahun 2024 memperoleh rata-rata kinerja 87,03% dengan indikator kinerja

1. Tingkat Kemiskinan
2. Tingkat Pengguran Terbuka

Sasaran 5 : “Meningkatnya Produktivitas Sektor Perekonomian Ungulan Daerah” pada tahun 2024 memperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 53,45% dengan indikator kinerja.

1. LPE Kategori Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan
2. LPE Kategori Industry Pengelolaan

Sasaran 6 : “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana”, pada tahun 2024 memperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 96,67% dengan indikator kinerja.

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Indeks Risiko Bencana

Sasaran 7 : “ Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur”, pada tahun 2024 dengan indikator kinerja Indeks Infrastruktur memperoleh capaian kinerja sebesar 87,48% atau prediket tinggi

Sasaran 8 : “ Meningkatkan Profesionalitas ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah”, pada tahun 2024 memperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 111,62% pada indikator kinerja

1. Nilai AKIP
2. Indeks Profesionalitas ASN

Sasaran 9 : “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah”, pada tahun 2024 memperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 83,85% dengan Prediket Tinggi pada indikator kinerja

1. Indeks Integritas
2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran 10 : “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”, pada tahun 2024 dengan indikator kinerja Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik memperoleh capaian kinerja sebesar 96,71%. dengan Prediket Sangat Tinggi

Sasaran 11 : “ Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Data Statistik Sektor” pada tahun 2024 dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Statistik. memperoleh capaian kinerja sebesar 82,23% atau prediket tinggi

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 ditetapkan 11 (sebelas) sasaran dengan 16 (enam belas) indikator, hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

❖ Terdapat **10 (sepuluh)** atau **54,30%** Indikator Kinerja kategori **sangat tinggi** , yaitu:

- 1) Indeks Pendidikan
- 2) Indeks Kesehatan
- 3) Indeks Pengeluaran
- 4) Tingkat Kemiskinan

- 5) Indeks Lingkungan Hidup
- 6) Indeks Resiko Bencana
- 7) Nilai AKIP
- 8) Indeks Profesional ASN
- 9) Indeks Integritas
- 10) Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik

❖ Terdapat **4 (empat)** atau **16,02%** Indikator Kinerja kategori **Tinggi** , yaitu:

- 1) Tingkat Pengangguran Terbuka
- 2) LPE Industri Pengelolaan
- 3) Indeks Infrastruktur
- 4) Indeks Pembangunan Statistik

❖ Terdapat **1 (satu)** atau **62,05 %** indikator kinerja kategori **sedang** , yaitu :

- 1) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

❖ Terdapat **1 (satu)** atau **1,05 %** indikator kinerja kategori **sangat rendah** , yaitu:

- 1) LPE Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Berkenaan dengan ketercapaian indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana di atas, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024 dapat dipenuhi sesuai harapan dengan total tingkat persentase ketercapaian sebesar 91,69 % atau kategori Sangat Tinggi.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
Maksud dan Tujuan LKJIP.....	2
Gambaran Umum Organisasi.....	3
Isu Strategis Kabupaten Indragiri Hilir Periode 2018-2023	15
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
Rencana Strategis Kab. Inhil Tahun 2024-2026	19
Indikator Kinerja Utama Kab. Inhil Tahun 2024-2026	26
Perjanjian Kinerja Tahun 2024	29
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024	31
Analisis Capaian Kinerja Pemkab Indragiri Hilir Tahun 2024.....	36
Akuntabilitas Anggaran Pemkab Indragiri Hilir Tahun 2024	103
BAB IV PENUTUP	
Kesimpulan.....	106
LAMPIRAN	
PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2024.....	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024	5
Gambar 1. 2 Rata-Rata Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Indragiri Hilir	6
Gambar 1. 3 Rata-Rata Curah Hujan Menurut Objek Pengamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023-2024	7
Gambar 1. 4 Indeks Pembangunan Manusia	8
Gambar 1. 5 IPM Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024.....	9
Gambar 1. 6 Persentase PNS di Kabupaten Indragiri Hilir	14
Gambar 1. 7 Jumlah PNS Menurut Golongan Tahun 2024	15
Gambar 3. 1 Perbandingan capaian kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) se Provinsi Riau.....	39
Gambar 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah (RLS) se Provinsi Riau.....	41
Gambar 3. 3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024.....	47
Gambar 3. 4 Perkembangan Nilai AKIP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2024 ..	79
Gambar 3. 5 Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023	89

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Tujuan Jangka Menengah Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang Tertuang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026	27
Tabel 2. 2	Indikator Tujuan / Makro Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir	27
Tabel 2. 3	Kaitan Tujuan/Sasaran dengan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.....	28
Tabel 2. 4	Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026.....	32
Tabel 2. 5	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024	30
Tabel 3. 1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	33
Tabel 3. 2	Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024	34
Tabel 3. 3	Indikator Kinerja Indeks Kesehatan Tahun 2023 s.d 2024.....	36
Tabel 3. 4	Efisiensi Sumber Daya Sasaran Strategis Indikator Kesehatan Tahun 2024.....	37
Tabel 3. 5	Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir Tahun 2024	38
Tabel 3. 6	Target Dan Realisasi Perbandingan Capaian Kinerja Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir 2023 s.d 2024	41
Tabel 3. 7	Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir.....	42
Tabel 3. 8	Kategori Pencapaian Kinerja	42
Tabel 3. 9	Efisiensi Sumber Daya Sasaran Strategis Indeks Pendidikan Tahun 2024.....	45
Tabel 3. 10	Capaian Kinerja Indikator Indeks Pengeluaran Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023-2024	47
Tabel 3. 11	Sasaran Strategis Indeks Pengeluaran Tahun 2024	48
Tabel 3. 12	Capaian Tingkat Kemiskinan Tahun 2023-2024.....	49
Tabel 3. 13	Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023-2024.....	51
Tabel 3. 14	Sasaran Strategis Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024.....	52
Tabel 3. 15	Indikator Kinerja LPE Kategori Pertanian, Kehutanan, Perikanan Tahun 2023-2024.....	53
Tabel 3. 16	Indikator Kinerja LPE Industri Pengolahan Tahun 2023-2024	56
Tabel 3. 17	Sasaran Strategis LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan & LPE Kategori Industri Pengolahan Tahun 2024	57
Tabel 3. 18	Perjanjian Kinerja Bupati Indragiri Hilir Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024	58
Tabel 3. 19	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	59
Tabel 3. 20	Hasil Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	60
Tabel 3. 21	Capaian Indikator Sasaran Strategis Indeks Kualitas Udara (IKU) Tahun 2023-2024	60
Tabel 3. 22	Capaian Indikator Sasaran Strategis Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2023-2024.....	62
Tabel 3. 23	Capaian Indikator Sasaran Strategis Indeks Kualitas Lahan (IKL) Tahun 2023-2024	64
Tabel 3. 24	Sasaran Strategis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup & Indeks Risiko Bencana Tahun 2024.....	70

Tabel 3. 25	Nilai Indeks Infrastruktur Tahun 2023 dan 2024	71
Tabel 3. 26	Perhitungan Indeks Infrastruktur Tahun 2023 dan 2024	71
Tabel 3. 27	Panjang dan Kondisi jalan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 ...	72
Tabel 3. 28	Panjang Jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022	73
Tabel 3. 29	Panjang dan Kondisi Jalan Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023..	73
Tabel 3. 30	Jumlah, Panjang dan kondisi jembatan di kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023.....	73
Tabel 3. 31	Indikator Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Dan Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik	74
Tabel 3. 32	Persentase Fasilitas Tempat Buang Air di Kabupaten Indragiri Hilir...	75
Tabel 3. 33	Persentase Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Indragiri Hilir.....	75
Tabel 3. 34	Sasaran Strategis Indeks Infrastruktur Tahun 2024.....	77
Tabel 3. 35	Kategori Penilaian SAKIP	78
Tabel 3. 36	Indikator Kinerja Nilai AKIP Tahun 2023-2024.....	78
Tabel 3. 37	Komponen Dan Pembobotan Nilai Evaluasi SAKIP	80
Tabel 3. 38	Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahunan Dengan Target Jangka Menengah	81
Tabel 3. 39	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2023	83
Tabel 3. 40	Tingkat Nilai Profesionalitas ASN	87
Tabel 3. 41	Capaian Kinerja Indeks Profesional ASN Tahun 2023-2024	88
Tabel 3. 42	Sasaran Strategis Nilai AKIP & Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024	91
Tabel 3. 43	Capaian Kinerja Indeks Integritas Tahun 2023-2024.....	92
Tabel 3. 44	Capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023-2024....	93
Tabel 3. 45	Sasaran Strategis Indeks Integritas & Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024	95
Tabel 3. 46	Nilai Persepsi IKM	96
Tabel 3. 47	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 dan 2023	96
Tabel 3. 48	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 dan 2024	97
Tabel 3. 49	Sasaran Strategis Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2024	98
Tabel 3. 50	Tingkat Kematangan Dan Kriteria Dalam EPSS	99
Tabel 3. 51	Predikat Indeks Hasil EPSS.....	100
Tabel 3. 52	Nilai Indeks Hasil EPSS 2024 Menurut Domain Dan Jenis Instansi Pemerintah	100
Tabel 3. 53	Nilai Indeks Pembangunan Statistik Dan Nilai Indeks Domain	101
Tabel 3. 54	Capaian Indeks Pembangunan Statistik	101
Tabel 3. 55	Sasaran Strategis Indeks Pembangunan Statistik Tahun 2024	103
Tabel 3. 56	Struktur APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024	104

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban yang peruntukannya, yakni mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas ditetapkan melalui media pertanggungjawaban. Pelaksanaannya sendiri, dilaksanakan secara periodik. Keterkaitan akuntabilitas dengan penyelenggaraan pemerintahan ialah akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan pemerintah Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.1.1 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan wujud pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan pemerintahan yang memuat rencana kinerja

maupun capaian kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 merupakan capaian kinerja tahun keempat dari RPJMD periode 2018-2023.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
3. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023.

1.2 Maksud Dan Tujuan Lkjp

Maksud dari penyusunan LKJIP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 adalah untuk menyampaikan kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Sarana bagi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam menyampaikan pertanggungjawaban tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir
2. Bentuk pertanggung jawaban instansi pemerintah yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
3. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan akuntabel serta mendorong tercapainya Good Governance;
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan strategis; dan
5. Mendorong Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir untuk dapat melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

Gambaran umum organisasi yaitu dalam hal ini Kabupaten Indragiri Hilir dijelaskan melalui beberapa aspek yaitu aspek geografis, aspek demografis, aspek daya saing daerah dan aspek pemerintahan, yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Aspek geografis menggambarkan luas dan batas wilayah administrasi, letak dan kondisi geografis, topografi, geologi, hidrologi, klimatologi, dan penggunaan lahan;
2. Aspek demografi menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu;
3. Aspek daya saing daerah menggambarkan potensi strategis yang dimiliki Kabupaten
4. Indragiri Hilir; dan
5. Aspek Pemerintahan menggambarkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hilir.

1.3.1 Aspek Geografis

Aspek Geografis menggambarkan mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Aspek demografi menggambarkan perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat. Letak, Luas dan Batas Wilayah Administrasi Secara astronomis, Kabupaten Indragiri Hilir berada pada posisi 0°36" Lintang Utara – 1°07" Lintang Selatan dan 102°32" Bujur Timur–104°10" Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Indragiri Hilir memiliki luas 1.352.510 Ha. Batas-batas wilayah kabupaten Indragiri Hilir adalah :

- Sebelah Utara dengan Kabupaten Pelalawan,
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Provinsi Jambi),
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu,
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Tanjung Balai Karimun (Provinsi Kepulauan Riau).



Kabupaten Indragiri Hilir terletak di pantai Timur Sumatera yang merupakan gerbang selatan Provinsi Riau. Posisi Kabupaten Indragiri yang strategis yaitu dekat dengan Selat Melaka dan sejak dulu telah melakukan perdagangan lintas batas dengan negara tetangga Malaysia. Disisi timur yang berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau menjadikan produksi hasil-hasil pertanian Indragiri Hilir dengan mudah dan cepat dibawah ke Kepulauan Riau khususnya Batam. Disisi selatan, Kabupaten Indragiri Hilir berbatasan Provinsi Jambi dan sekaligus dilintasi oleh jalan Nasional Lintas Timur". Posisi kabupaten yang

strategis dapat menjadi modal dalam pertumbuhan ekonominya.

Secara administratif, Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 20 Kecamatan dan 197 Desa dan 39 Kelurahan. Luas wilayah, jumlah desa dan jumlah kelurahan menurut kecamatan.

1.3.2 Aspek Demografi

Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2024 sebanyak 729.147 jiwa yang terdiri atas 375.806 jiwa penduduk laki-laki dan 353.341 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun 2020-2024 sebesar 2,72 % dengan kepadatan Penduduk 55,51 jiwa/km² dengan besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2024 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 106,36.

Gambar 1. 2 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2024



Sumber : BPS (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka 2025)

Gambar 1. 3 Rata-Rata Curah Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Indragiri Hilir

Bulan Month	Rata-rata Hari Hujan (hari) Rainday (days)		Curah Hujan (mm) Rainfall (mm)	
	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari/January	15	17	212,2	364,8
Februari/February	12	9	143,9	162,2
Maret/March	11	11	166,3	208,0
April/April	15	13	262,4	301,4
Mei/May	10	13	187,4	243,9
Juni/June	8	10	99,0	185,3
Juli/July	10	6	198,1	78,4
Agustus/August	9	8	169,3	101,0
September/September	6	11	98,7	214,8
Oktober/October	8	7	77,9	107,4
November/November	13	15	201,3	281,1
Desember/December	19	12	406,1	176,5

Sumber : BPS (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka 2025)

Kabupaten Indragiri Hilir dikenal dengan negeri seribu parit. Kabupaten ini sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungai/parit, dimana sarana perhubungan yang dominan untuk menjangkau daerah satu dengan daerah lainnya adalah melalui sungai/parit dengan menggunakan kendaraan speed boat, pompong, dan perahu. Diantara sungai-sungai yang utama di daerah ini adalah Sungai Indragiri yang berasal dari dari Danau Singkarak (Sumatera Barat) yang bermuara diselat berhala.

Rata-rata curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari 2024 sebesar 364,8 mm dan 406,1 mm pada bulan Desember 2023. Sebaliknya rata-rata curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli 2024 yaitu 78,4 mm dan 77,9 mm pada bulan Oktober 2023.

Gambar 1. 4 Rata-Rata Curah Hujan Menurut Objek Pengamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023-2024

Wilayah Pengamatan <i>Observed Area</i>	Jumlah Hari Hujan (hari) <i>Rainday (days)</i>		Curah Hujan (mm) <i>Rainfall (mm)</i>	
	2023	2024	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Keritang	129	117	2.431	2.317
Kemuning	142	164	2.018	2.498
Retei	146	84	2.387	1.331
Sungai Batang Batang	145	130	2.208	1.995
Benteng Utara Utara	111	131	3.369	2.412
Metro	... ¹	179	... ¹	2.460
Enok	100	100	1.985	1.985
Tanah Merah Merah	147	126	2.171	1.994
Kuala Indragiri Indragiri	147	133	2.323	2.182
Concong	148	116	1.645	1.573
Pekan Arba Arba	156	215	141	2.295
Tembilahan Hilir	150	156	1.608	3.669
Tembilahan Hulu	164	158	2.206	2.524
Tempuling	130	134	1.540	1.970
Kempas	178	191	2.545	1.909
Batang Tuaka	136	162	2.202	2.054
Gaurg Anak Serka	115	121	3.107	3.557
Gaurg	119	149	2.143	2.557
Lahang Hulu	90	98	1.652	2.039
Mandah	109	105	2.344	3.125
Kateman	150	140	2.354	1.687
Pelangiran	118	114	2.175	2.408
Teluk Belengkong	123	131	2.697	3.516
Pulau Burung	165	109	2.394	4.006

Sumber : BPS (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka 2025)

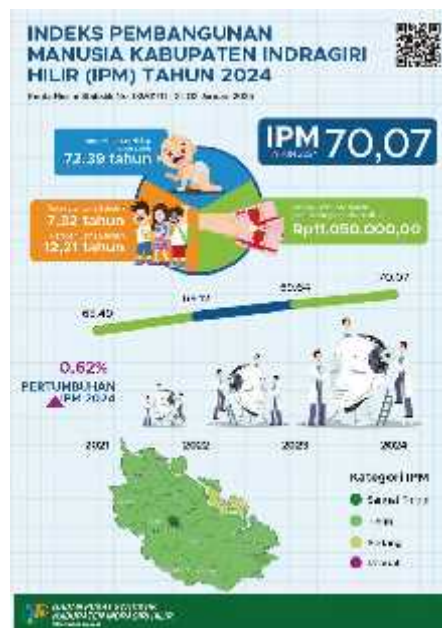
Menurut hasil pengamatan di beberapa tempat yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2024 didapatkan data bahwa jumlah hari hujan yang tertinggi terdapat di wilayah pengamatan Pekan Arba sebanyak 215 hari sedangkan untuk curah hujan tertinggi terdapat di wilayah pengamatan Pulau Burung sebesar 4.006 mm. Untuk tahun 2023 jumlah hari hujan tertinggi terdapat di wilayah pengamatan Kempas dengan jumlah hari hujan sebanyak 178 hari sedangkan untuk curah hujan tertinggi terdapat di wilayah pengamatan Benteng Utara dengan curah hujan 3.369 mm.

1.3.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan atau kemajuan pemerintah dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia, yaitu bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Nilai IPM yang semakin tinggi menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Sumber daya manusia di Kabupaten Indragiri Hilir secara kontinu menjadi fokus pembangunan. IPM Indragiri Hilir pada tahun 2024 adalah 70,07. Capaian IPM ini masuk pada kategori sedang karena berada pada range 60-70. Jika dibandingkan dengan capaian IPM Provinsi Riau, terdapat perbedaan 5,31 persen.

Gambar 1. 5 Indeks Pembangunan Manusia



Sumber : BPS (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka 2025)

Gambar 1. 6 IPM Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2024

Tahun Year	UHH ¹ Life Expectancy	HLS/EYS ²	RLS/MYS ³	Pengeluaran per Kapita Per Capita Expenditure	IPM/HDI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2020	72,03	11,91	7,23	9.954	68,43
2021	72,11	11,93	7,24	9.945	68,49
2022	72,19	12,19	7,26	10.234	69,12
2023	72,27	12,20	7,31	10.659	69,64
2024	72,39	12,21	7,32	11.050	70,07

Sumber : BPS (Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka 2025)

Berdasarkan hasil data yang dikumpulkan oleh BPS Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat bahwa setiap tahunnya Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Indragiri Hilir mengalami kenaikan. Untuk tahun 2024 IPM mengalami kenaikan sebesar 0,43 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya..

1.3.4 Aspek Pemerintahan

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yang terdiri dari urusan wajib, baik urusan wajib pelayanan dasar maupun urusan wajib non pelayanan dasar, serta urusan pilihan urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 6 (enam) urusan yaitu :

1. Urusan Pendidikan;
2. Urusan Kesehatan;
3. Urusan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Urusan Ketentaraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
6. Urusan Sosial.

Sedangkan urusan wajib non pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari 18 Layanan yaitu :

1. Tenaga Kerja;
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
3. Pangan;
4. Pertanahan;
5. Lingkungan Hidup;
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
9. Perhubungan;
10. Komunikasi dan Informatika;
11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
12. Penanaman Modal;
13. Kepemudaan dan Olahraga;
14. Statistik;Persandiaan;
15. Kebudayaan;
16. Perpustakaan ;
17. Kearsipan.

Adapun urusan pilihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, terdapat 7 (tujuh) urusan, yaitu :
Layanan urusan pilihan yang terdiri dari :

1. Pariwisata;
2. Pertanian;
3. Perdagangan;
4. Perindustrian;
5. Transmigrasi;

6. Kelautan dan perikanan;
7. Pariwisata.

Sehingga total terdapat 31 (Tiga Puluh Satu) urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tersebut dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, dibentuk perangkat daerah sebagai berikut:

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Adapun susunan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yaitu :

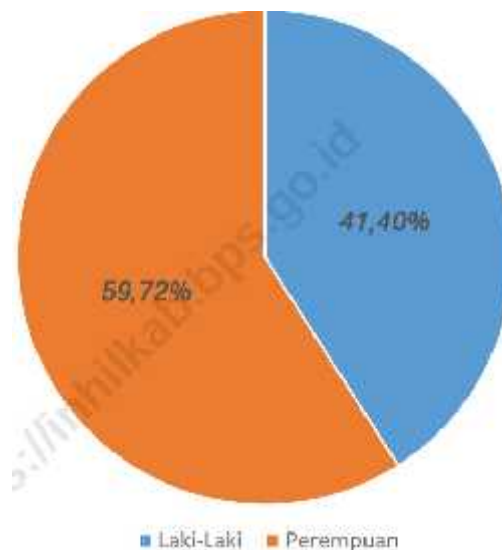
1. Sekretariat Daerah Tipe A, merupakan unsur staf, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.
2. Sekretariat DPRD Tipe A, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Inspektorat Daerah Tipe A, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Dinas Daerah, terdiri dari :
 - a. Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan
 - b. Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum.

- f. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran.
- g. Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- h. Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi.
- i. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- j. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.
- k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
- m. Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- n. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, bidang persandian dan bidang statistik.
- o. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- p. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
- q. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan, dan olahraga, dan bidang kebudayaan
- r. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan.

- s. Dinas Perikanan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
 - t. Dinas Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan bidang pangan lingkup bidang tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan ketahanan pangan.
 - u. Dinas Perkebunan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian lingkup bidang perkebunan.
 - v. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan bidang perindustrian.
5. Badan Daerah, terdiri dari :
- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan.
 - b. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan lingkup bidang pengelolaan keuangan dan Aset Daerah.
 - c. Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan lingkup bidang pengelolaan pendapatan daerah/pengelolaan pajak dan retribusi daerah.
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
6. Kecamatan, terdiri dari :
- a. Kecamatan Tembilahan Tipe A.
 - b. Kecamatan Tembilahan Hulu Tipe A.
 - c. Kecamatan Tempuling Tipe A.
 - d. Kecamatan Batang Tuaka Tipe A.
 - e. Kecamatan Concong Tipe A.
 - f. Kecamatan Enok Tipe A.
 - g. Kecamatan Gaung Tipe A.

- h. Kecamatan Gaung Anak Serka Tipe A.
- i. Kecamatan Kateman Tipe A.
- j. Kecamatan Kempas Tipe A.
- k. Kecamatan Kemuning Tipe A.
- l. Kecamatan Keritang Tipe A.
- m. Kecamatan Kuala Indragiri Tipe A.
- n. Kecamatan Mandah Tipe A.
- o. Kecamatan Pelangiran Tipe A.
- p. Kecamatan Reteh Tipe A.
- q. Kecamatan Sungai Batang Tipe A.
- r. Kecamatan Tanah Merah Tipe A.
- s. Kecamatan Pulau Burung Tipe A.
- t. Kecamatan Teluk Belengkong Tipe A

Gambar 1. 7 Persentase PNS di Kabupaten Indragiri Hilir



Sumber: BPS, Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka 2025

Gambar 1. 8 Jumlah PNS Menurut Golongan Tahun 2024

Pangkat/Golongan/Ruang Hierarchy		Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)		(2)	(3)	(4)
Golongan I/Range I		21	2	23
1. I/A	(Juru Muda/Junior Clerk)	-	-	-
2. I/B	(Juru Muda Tingkat I/First Class Junior Clerk)	3	-	3
3. I/C	(Juru/Clerk)	9	-	9
4. I/D	(Juru Tingkat I/First Class Clerk)	9	2	11
Golongan II/Range II		427	260	687
5. II/A	(Pengatur Muda/Junior Supervisor)	32	3	35
6. II/B	(Pengatur Muda Tingkat I/First Class Junior Supervisor)	63	12	75
7. II/C	(Pengatur/Supervisor)	130	48	178
8. II/D	(Pengatur Tingkat I/First Class Supervisor)	202	197	399
Golongan III/Range III		1.471	2.507	3.978
9. III/A	(Penata Muda/Junior Superintendent)	290	408	698
10. III/B	(Penata Muda Tingkat I/First Class Junior Superintendent)	362	653	1.015
11. III/C	(Penata/Superintendent)	291	440	731
12. III/D	(Penata Tingkat I/First Class Superintendent)	528	1.006	1.534
Golongan IV/Range IV		553	978	1.531
13. IV/A	(Pembina/Administrator)	215	350	565
14. IV/B	(Pembina Tingkat I/First Class Administrator)	242	503	745
15. IV/C	(Pembina Utama Muda/Junior Administrator)	95	125	220
16. IV/D	(Pembina Utama Madya/Middle Administrator)	1	-	1
17. IV/E	(Pembina Utama/Senior Administrator)	-	-	-
Jumlah/Total		2.472	3.747	6.219

Sumber: BPS, Kabupaten Indragiri Hilir Dalam Angka 2025

1.4 Isu Strategis Kabupaten Indragiri Hilir Priode 2018-2023

Adapun isu-isu strategis penting Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir perlu ditingkatkan mengingat besarnya afirmasi dan atensi baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Disamping itu, keberhasilan program Bupati dan pembangunan daerah pada level teknis sangat bergantung pada kinerja aparatur dan kualitas penyelenggaraan pemerintah tersebut. Oleh karena itu, perwujudan tata pemerintahan yang baik sangat perlu untuk ditingkatkan. Dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, melaksanakan pemerintahan di Kabupaten Indragiri Hilir telah melaksanakan inovasi pemerintahan yang telah diwujudkan dalam inovasi pelayanan publik, inovasi tata kelola pemerintahan dan inovasi

lainnya. Untuk memperkuat optimalisasi inovasi pemerintahan tersebut Kabupaten Indragiri Hilir menindaklanjutinya dengan penerapan Mal Pelayanan Publik (MPP) guna mewujudkan pelayanan publik maksimal bagi masyarakat.

2. Pemantapan pemerataan pembangunan. Pembangunan infrastruktur di Kabupaten Indragiri Hilir belum sepenuhnya terpenuhi secara optimal baik kuantitas maupun kualitasnya. Panjang jalan dan jembatan serta infrastruktur perhubungan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Selain itu sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi, serta perumahan perlu penangannan yang lebih baik lagi. hal ini dalam rangka mengakomodir penyediaan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan, serta infrastruktur dasar lainnya di Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu juga perlu adanya penanganan terhadap Limbah dan Drainase yang mengakibatkan terjadinya genangan apabila hujan deras dan Pasang naik terutama di daerah perkotaan.
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Pertumbuhan ekonomi sampai saat ini masih menjadi parameter pembangunan suatu wilayah. Perekonomian Kabupaten Indragiri Hilir masih di topang dengan potensi pertanian dan perkebunan, akan tetapi pendapatan asli daerah sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah masih belum memiliki sumber – sumber potensi pendapatan lainnya yang dapat dijadikan pendapatan asli daerah guna menunjang perekonomian daerah.
4. Menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. Akses pelayanan sosial dasar bagi PMKS di Kabupaten Indragiri Hilir masih terbilang lambat. Kondisi-kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa, pelayanan kebutuhan dasar lain seperti PMKS serta penguatan kearifan lokal melalui modal sosial dan akses lapangan pekerjaan perlu ditingkatkan.
5. Peningkatan kualitas SDM yang beriman dan berdaya saing. Akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dapat didefinisikan melalui perspektif jarak maupun keterjangkauan layanan. Kabupaten Indragiri Hilir teridentifikasi bahwa beberapa layanan pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya terpenuhi dengan optimal Seperti layanan PAUD dan akses pendidikan 12 tahun yang belum mampu tercapai secara optimal. Kondisi ini dapat merupakan bagian dari efek domino berbagai aspek seperti misalnya aspek fisik seperti infrastruktur,

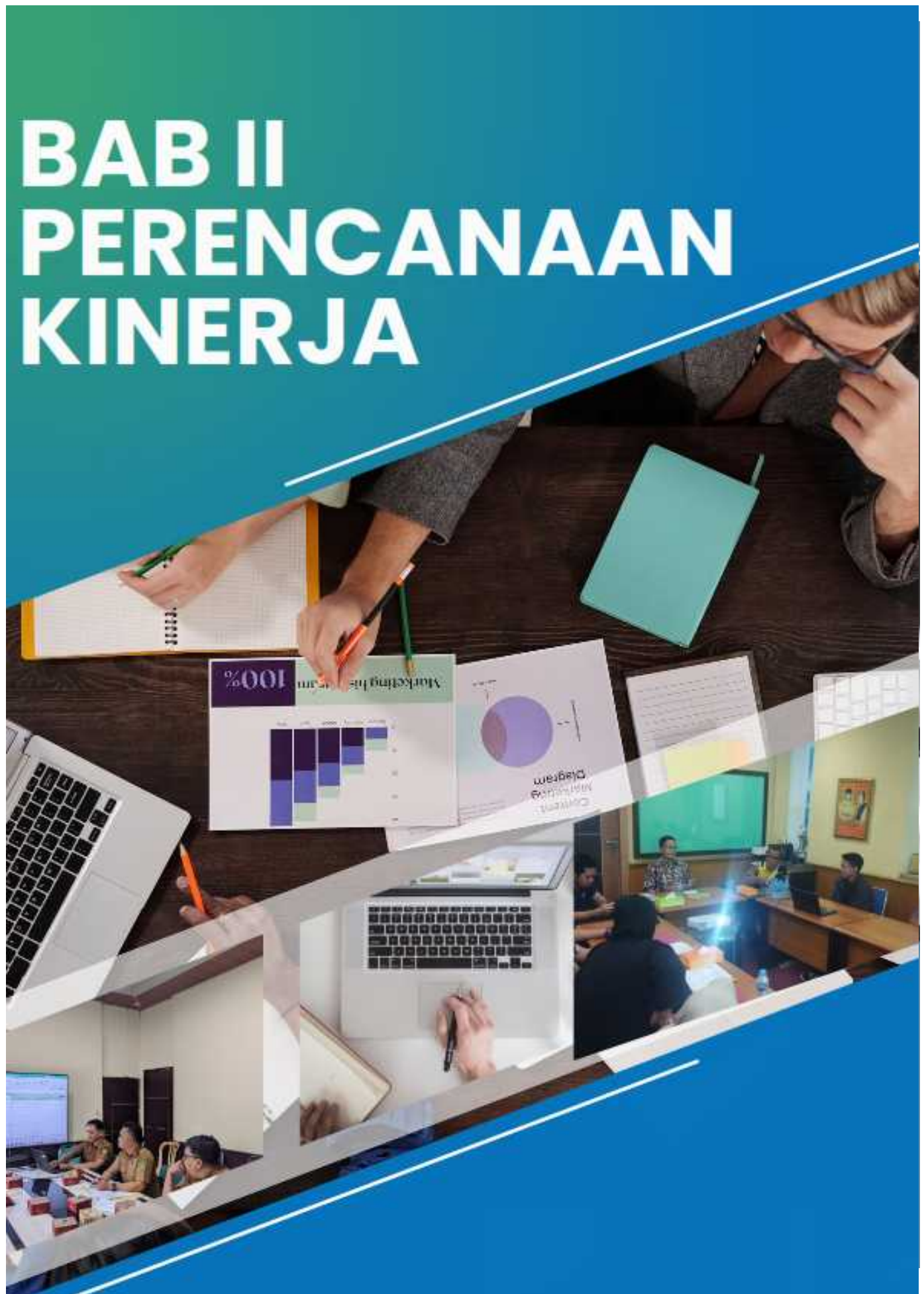
sarana dan prasarana maupun non-fisik seperti sosial, budaya maupun kapasitas finansial.

6. Pemantapan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan dasar yang masih belum mampu menjangkau keseluruhan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir khususnya daerah perdesaan, terlebih lagi dengan adanya Pandemi Covid-19 yang harus menjadikan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat harus jauh lebih optimal.
 7. Pengelolaan potensi sumberdaya alam lebih produktif dan berwawasan lingkungan. Kabupaten Indragiri Hilir memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar khususnya perkebunan dan pangan serta perikanan untuk mendorong pengembangan potensi ekonomi dan menciptakan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Kabupaten Indragiri Hilir. Isu utama terkait dengan pengelolaan potensi sumberdaya alam adalah luas perkebunan kelapa sebesar 61.025 ha yang berada dalam kondisi rusak dan tua, serta diverifikasi produk yang rendah, dimana belum adanya industri – industri hilir dari produk kelapa Kabupaten Indragiri Hilir. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya perkebunan kelapa yakni dengan penyelenggaraan pembangunan kawasan perdesaan, dengan penetapan kawasan perdesaan perkebunan kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir tentunya memberi peluang adanya bantuan terkait pengembangan potensi perkebunan kelapa yang akan berimplikasi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat. Indragiri Hilir mempunyai beberapa tempat wisata yang cukup menarik untuk dikunjungi seperti
 - (i) Ekowisata Pantai Solop, Hutan Mangrove seperti Hutan Mangrove Sungai Bela
 - (ii) Perbukitan dalam kawasan Bukit tiga puluh seperti Bukit Condong
 - (iii) Air Terjun seperti Air Terjun 86, Air Terjun Tembulon Ruso
- (IV) Danau Seperti Danau mablu (V) Wisata Religi seperti Makam Syek Abdurrahman Siddiq Al Banjari dan masih banyak lagi potensi wisata di Indragiri Hilir yang telah ditetapkan dalam Peraturan bupati Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kepariwisataaan. Namun secara umum, pariwisata di Indragiri Hilir relatif belum berkembang, dimana objek-objek wisata yang ada belum dikelola dengan baik dan dilengkapi sarana-prasarana yang memadai.

Isu yang cukup menjadi perhatian di Kabupaten Indragiri Hilir adalah kondisi alam gelombang pasang yang mengakibatkan terjadinya abrasi di beberapa wilayah daratan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, upaya rekonstruksi wilayah rawan abrasi melalui pelestarian hutan mangrove dapat menjadi solusinya.

8. Mewujudkan kerukunan, ketentraman dan ketertiban. Isu ketentraman dan ketertiban yang menjadi isu daerah dengan ruanglingkup nasional bahkan internasional adalah terkait dengan isu keamanan kejahatan transnasional peredaran narkoba, mengingat kondisi geografis Kabupaten Indragiri Hilir yang masuk dalam daerah terluar Indonesia tentu dapat menjadi pintu masuk bagi peredaran narkoba transnasional yang perlu juga menjadi perhatian.
9. Peningkatan pembangunan sosial ekonomi pedesaan melalui Program DMIJ Plus Terintegrasi Pada periode sebelumnya Pemerintah kabupaten Indragiri Hilir meluncurkan Program yang bernama Desa Maju Indragiri Hilir Jaya. Pada perkembangannya, dengan melihat progres positif yang telah dicapai oleh Desa terutama pada program pembangunan fisik dan kegiatan sosial dan keagamaan lainnya, maka dinilai perlu untuk menambah serta mengevaluasi apa saja yang bisa menjadi nilai tambah dari program ini maka diluncurkanlah yang disebut dengan Program DMIJ Plus Terintegrasi. Program ini sebagai wadah bagi seluruh Stakeholder untuk memberikan perhatiannya ke Desa dan Kelurahan. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat Desa dengan menjadikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai porosnya. Setelah rampung pada pembangunan infrastruktur, membuka akses Desa untuk jalannya perekonomian Desa maka Desa diminta untuk mampu mengelola serta mengontrol potensi local Desa sehingga memiliki nilai ekonomis. Desa diharapkan menjadi pilar kuat Daerah dimana Desa memiliki sumber PADes sendiri dan pengelolaannya secara efektif dan efisien dengan SDM yang berkualitas.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A collage of images related to performance planning and business strategy. The top half features a blue gradient background with the title 'BAB II PERENCANAAN KINERJA' in large white letters. Below the title, there's a dark wooden table with various items: a person's hands writing in a notebook, a laptop, a bar chart titled 'Marketing Performance' showing a 100% goal, a pie chart titled 'Marketing Program', and a person using a laptop. The bottom half shows a group of people in a meeting room, with one person presenting at a whiteboard. The entire collage is framed by a blue border.

2.1 Rencana Strategis Tahun 2024-2026

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, perencanaan strategis merupakan perencanaan yang dituangkan ke dalam sebuah dokumen perencanaan jangka menengah yang umumnya disusun untuk pelaksanaan pembangunan dalam periode 5 (lima) tahunan atau yang lebih dikenal dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan dokumen RPJMD biasanya dilakukan secara periodik, seiring dengan pergantian kepemimpinan daerah, yakni Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasca berakhirnya kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir di tahun 2023, dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 pun telah selesai. Untuk melanjutkan pembangunan, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir seyogyanya memulai penyusunan RPJMD untuk periode berikutnya. Namun, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam pasal 201 ayat (9) menyatakan bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang berakhir masa jabatannya tahun 2022 dan 2023, diangkat penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional pada tahun 2024, maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan pemerintah daerah lainnya diharuskan untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Daerah atau RPD sebagai acuan pelaksanaan pembangunan di masa transisi kepemimpinan daerah sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPD) Bagi daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada tahun 2023.

Dokumen RPD yang disusun untuk periode 2024-2026 di masa transisi kepemimpinan daerah ini merupakan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD tahunan, yang selanjutnya dijadikan pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD.

Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir disusun berdasarkan visi dan misi RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir dan isu strategis aktual yang terjadi di Kabupaten Indragiri Hilir. RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 merupakan periode keempat (Tahap ke-IV) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2005-2025. Visi RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir adalah **“INHIL BERJAYA DAN GEMILANG 2025”**. Penyusunan RPD Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan dapat mengakomodir dan selaras dengan pelaksanaan RPJPD dalam rangka mewujudkan visi pembangunan jangka panjang demi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, RPD juga dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis bagi seluruh Perangkat Daerah. Dengan ini, penyusunan RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026 dilaksanakan sebagai instrument pelaksanaan periode terakhir RPJPD Kabupaten Indragiri Hilir. Sehingga, RPD ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan untuk tahun 2024, tahun 2025 dan tahun 2026. Melalui RPD, diharapkan juga dapat mengakselerasi percepatan pembangunan dan pemulihan ekonomi di era pandemi Covid-19, serta mengakomodir pencapaian target/indikator pembangunan daerah di Kabupaten Indragiri Hilir dengan demikian tujuan pembangunan dapat segera tercapai.

2.1.1 Visi

Berdasarkan hasil penelaahan dokumen rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2005-2025, maka diketahui visi pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir beserta penjabarannya sebagai berikut:

“INHIL BERJAYA DAN GEMILANG 2025”

Penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut :

- BERJAYA adalah adalah suatu keberhasilan dalam mencapai keadaan yang lebih baik, makmur, adil dan sejahtera sebagai sebuah prestasi di segala bidang, baik secara fisik dan mental spiritual, maupun jasmani dan rohaniah melalui ikhtiar dan kerja keras yang dilakukan secara Bersama-sama dan seluruh komponen masyarakat dan pemerintahan Indragiri Hilir dengan tetap

berlandaskan pada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, nilai kebudayaan Melayu yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, nilai dan norma hukum yang berlaku.

- GEMILANG sebagai sebuah kemajuan yang hebat akan dapat dicapai melalui pengelolaan yang lebih baik terhadap system perencanaan, pelaksanaan, pengawasan pembangunan yang bersinergai, sistematis dan konseptual antara pemerintah dengan seluruh stakeholders, yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur perekonomian daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik yang semakin berkualitas dan berkembangnya tatanan sosial dan budaya masyarakat.

2.1.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi jangka Panjang pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RPJPD Tahun 2025-2045, maka terdapat sejumlah misi yang akan dilaksanakan, yaitu:

- 1) Mewujudkan daya saing daerah.
- 2) Mewujudkan suasana kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis.
- 3) Mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
- 4) Mewujudkan suasana aman, damai, dan harmonis yang bermoral, beretika dan berbudaya.
- 5) Mewujudkan daerah yang memiliki peran penting pada tingkat regional, nasional dan internasional.

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Indragiri Hilir tertuang di dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026. Berikut tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan daerah Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Tahun 2024-2026:

Tabel 2. 1 Tujuan Jangka Menengah Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir yang Tertuang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

RPD					
Tujuan			Sasaran		
T.1	Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat	S.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		
		S.2	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat		
		S.3	Meningkatnya pendapatan masyarakat		
		S.4	Menurunnya kemiskinan dan Pengangguran		
T.2	Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	S.5	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah		
		S.6	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana		
		S.7	Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan		
T.3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	S.8	Meningkatnya Profesionalitas ASN dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah		
		S.9	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah		
		S.10	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		

Tabel 2. 2 Indikator Tujuan / Makro Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir

No	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SATUAN	KONDISI 2024	KONDISI 2026
1	2	3	4	5	
1	Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	67,37	68,35
2	Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	5,31	6.09
3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)	Indeks Reformasi Birokrasi	Persentase	B (63,07)	B (66.21)

2.1.4 Strategi dan Arah Pembangunan Daerah

Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Arah kebijakan pembangunan memberikan pedoman bagaimana strategi terhubung ke sasaran dan kapan sasaran tersebut harus dicapai. Arah kebijakan diwujudkan dengan fokus sasaran dari waktu ke waktu selama masa periode 2024-2026. Arah kebijakan selama 3 (tiga) tahun tersebut kemudian dijabarkan kepada prioritas dan sasaran pembangunan. Prioritas dan sasaran pembangunan menjadi tahapan pembangunan selama tiga tahun yang nantinya akan menjadi pedoman Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada saat penyusunan RKPD.

Adapun keterkaitan antara tujuan dan sasaran dengan strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian Indragiri Hilir Gemilang pada periode 2024-2026 adalah sebagai berikut :T

Tabel 2. 3 Kaitan Tujuan/Sasaran dengan Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

Tujuan/Sasaran			Strategi			Arah Kebijakan
Tujuan 1	Mewujudkan kesejahteraan dan daya saing masyarakat					
	Sasaran 1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan	1	Peningkatan layanan kesehatan tingkat dasar dan pemerataan tenaga Kesehatan
	Sasaran 2	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	2	Akselerasi kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan	2	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang merata didukung dengan sarana dan prasarana sesuai standar
	Sasaran 3	Meningkatnya pendapatan masyarakat	3	Optimalisasi pengentasan kemiskinan	3	Optimalisasi perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat melalui

						pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan UMKM
	Sasaran 4	Meningkatnya kualitas kesempatan kerja	4	Peningkatan produktivitas tenaga kerja	4	Peningkatan keterampilan dan keahlian angkatan kerja
Tujuan 2	Mewujudkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan					
	Sasaran 5	Meningkatnya produktivitas sektor perekonomian unggulan daerah	5	Pengembangan potensi agroindustri daerah	5	Pengembangan perkebunan kelapa rakyat
					6	Digitalisasi pertanian dalam mendukung peningkatan produksi komoditas pertanian dan perikanan
					7	Pengembangan kawasan terpadu guna menguatkan pembangunan agribisnis, pariwisata, dan ekonomi kreatif
	Sasaran 6	Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana	6	Meminimalisir potensi kerusakan lingkungan hidup pada aktivitas perekonomian	8	Mengoptimalkan pengawasan aktivitas ekonomi yang berpotensi degradasi lingkungan hidup
	Sasaran 7	Meningkatnya kualitas dan pemerataan infrastruktur pembangunan	7	Percepatan penyediaan infrastruktur pembangunan daerah	9	Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur menuju Kawasan Sentra produksi pangan (KSPP), konektivitas terhadap pusat pemerintahan, layanan publik dan perumahan
Tujuan 3	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)					
	Sasaran 8	Meningkatnya Profesionalitas	8	Memperkuat manajemen ASN	10	Meningkatkan profesionalitas dan

		ASN dan akuntabilitas kinerja		seluruh urusan pemerintahan		integritas ASN serta pengembangan Kompetensi
		Pemerintah Daerah	9	Reformasi manajemen pemerintahan melalui Percepatan implementasi Akuntabilitas Kinerja	11	Penguatan tata kelola kelembagaan dan implementasi perencanaan pembangunan daerah
	Sasaran 9	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	10	Peningkatan Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan keuangan Daerah	12	Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan
					13	Digitalisasi tata kelola keuangan daerah
	Sasaran 10	Meningkatnya kualitas pelayanan public	11	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berorientasi Pada Layanan berbasis elektronik	14	Meningkatkan kualitas tata kelola TIK

Berdasarkan tabel diatas sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa fokus arah kebijakan pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir 5 (lima) tahun kedepan adalah peningkatan, optimalisasi, pengembangan, penguatan dan digitalisasipada sejumlah sektor.

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir ditetapkan melalui Peraturan Bupati Indragiri

Hilir Nomor 60 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 33 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 57 Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023. Adapun IKU Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

Tabel 2. 4 Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET		
				2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Kesehatan	Indeks	0,743	0,750	0,754	0,758
2.	Indeks Pendidikan	Indeks	0,581	0,582	0,583	0,585
3.	Indeks Pengeluaran	Indeks	0,708	0,715	0,718	0,721
4.	Tingkat Kemiskinan	Persen	5,98	5,47	5,24	5,00
5.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	1,50	1,44	1,41	1,38
6.	LPE Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	4,34	4.64	4.87	5.12
7.	LPE Sektor Industri Pengolahan	Persen	4,68	5.34	5.60	5.88
8.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,31	68,05	68,43	68,81
9.	Indeks Risiko	Nilai	168.4*	162	158	154

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET		
				2024	2025	2026
	Bencana					
10.	Indeks Infrastruktur	Persen	58.99	63.33	65.71	67.88
11.	Nilai AKIP	Predikat	B (64.10)	B (68.01)	BB (70.90)	BB (71.23)
12.	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	57,06	58,10	58,12	58,15
13.	Indeks Integritas	Indeks	72,65	74,00	74,50	75,00
14.	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	75,47*	78,32	79,82	81,65
15.	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Persen	83,40	89,64	92,24	94,83

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta dengan memperhatikan tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 serta dengan mempertimbangkan Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Kementerian PAN RB Nomor B/207/AA.05/2023 dan Penguatan Akuntabilitas Kinerja bersama Tim Evaluator KemenPANRB.

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang Waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja adalah :

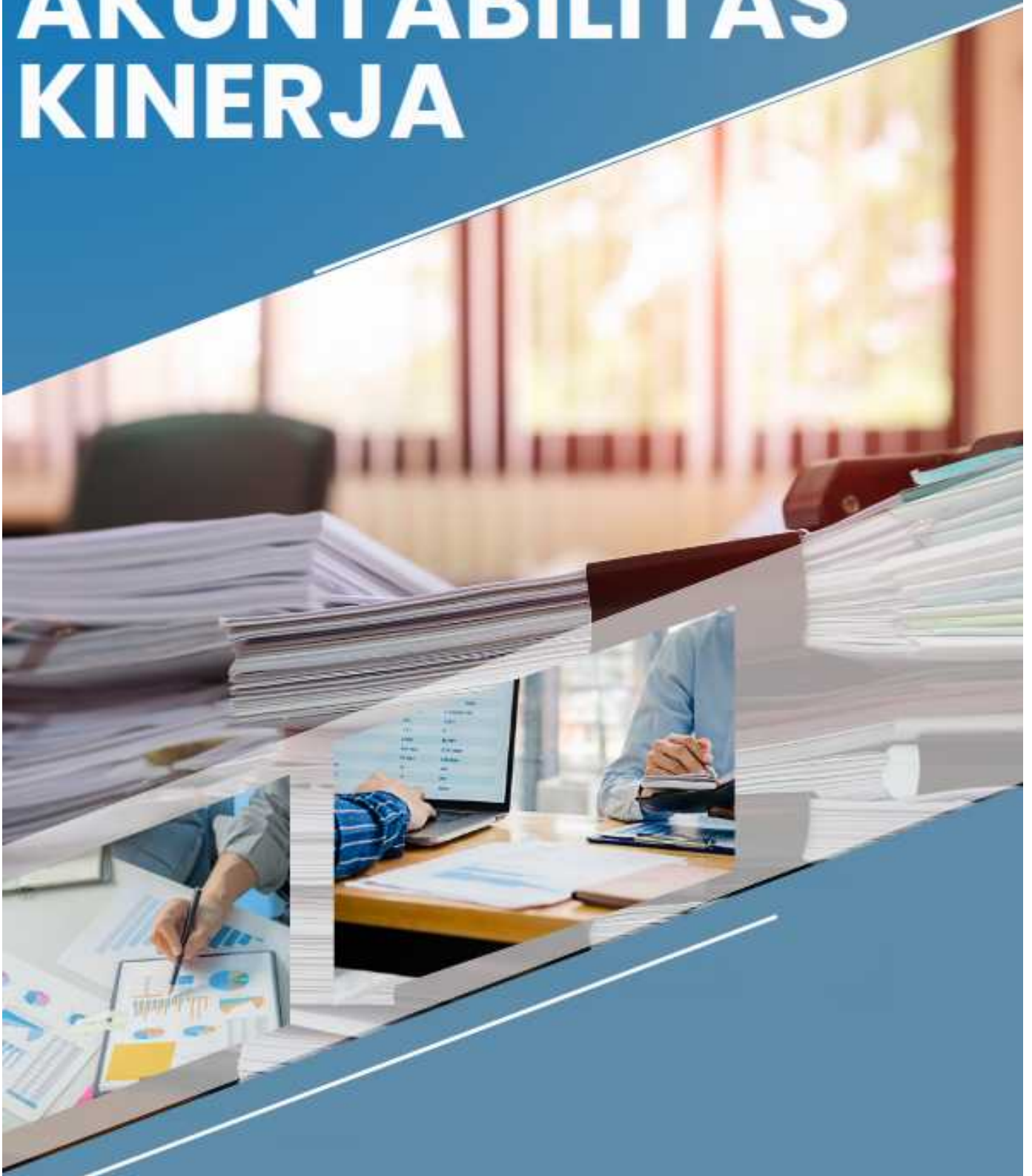
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.
4. Menciptakan tolok ukur kinerja dengan dasar evaluasi kinerja aparatur.

Adapun perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator	Target
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,750
2	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	0,582
3	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Indeks Pengeluaran	0,715
4	Menurunnya Kemiskinan dan Penangguran	Tingkat Kemiskinan	5,47
		Tingkat Pengangguran Terbuka	1,44
5	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perekonomian Unggulan Daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,64
		LPE Kategori Industri Pengolahan	5,34
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,05
		Indeks Resiko Bencana	162,00
7	Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan	Indeks Infrastruktur	63,33
8	Meningkatnya Profesionalitas ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai AKIP	B (68,01)
		Indeks Profesionalitas ASN	58,10
9	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Indeks Integritas	81,71
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	82,28
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	89,64
11	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	2,60

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA





Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah atau disingkat
dengan SAKIP tertuang
dalam peraturan presiden
Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah,
Akuntabilitas Kinerja
Instansi pemerintah (AKIP)

adalah suatu wujud tanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

3.1 Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Pengukuran kinerja merupakan proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang ditentukan sebelumnya. Pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai ukuran keberhasilan dalam kurun waktu tertentu dan hasil pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai masukan untuk perbaikan dan peningkatan di masa yang akan datang.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja strategis dengan realisasi pada tahun sebelumnya. Kemudian dilakukan penghitungan untuk mengetahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*) dan selanjutnya dianalisis tingkat keberhasilan setiap indikator untuk mengetahui faktor kunci keberhasilan maupun kegagalan sebagai strategi dan rekomendasi pemerintah kabupaten Indragiri Hilir dalam penetapan kebijakan untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*) sebagaimana yang diamanahkan dalam RPD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023-2026.

Dalam pengukuran tingkat keberhasilan setiap indikator menggunakan metode perhitungan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Kepala Lembaga

Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2023 tentang perbaikan pedoman Penyusunan Pelaporan

Akuntabilita Kinerja Instansi Pemerintah, dan peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan kinerja, Metode pengukuran terhadap capaian kinerja yang dilakukan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Perhitungan persentase pencapaian target kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi sebagai berikut :

1. *Semakin tinggi realisasi* menunjukkan *pencapaian kinerja semakin baik*, dengan menggunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

2. *Semakin tinggi realisasi* menunjukkan *semakin rendah pencapaian kinerja*, digunakan rumus :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{target} - (\text{realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala ordinal sebagai berikut :

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator kinerja dan rata-rata tingkat capaian berdasarkan sasaran strategis, digunakan skala nilai peringkat kinerja tersaji dalam tabel 3,1:

Tabel 3. 1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Tinggi	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$55 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Dalam melakukan pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, memanfaatkan data kinerja yang diperoleh melalui sistem pengumpulan data kinerja dari beberapa sumber, yaitu :

- 1) Data Internal yang berasal dari sistem informasi dan pelaporan yang ada, baik laporan Kegiatan Regular, Laporan akuntabilitas kinerja perangkat Daerah, Laporan Keuangan Perangkat Daerah / Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, laporan kegiatan lainnya maupun data pendukung lainnya;
- 2) Data Eksternal, digunakan data-data sekunder sepanjang relevan dengan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir khususnya data-data yang bersumber atas hasil hitung Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Indragiri Hilir.

3.2 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menyajikan setiap sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja, dan dilakukan analisis capaian kinerja yang menyajikan perbandingan realisasi dan target kinerja tahun 2024. Kemudian melakukan perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir. Perbandingan target jangka menengah dan secara nasional. Selanjutnya dilakukan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atau penurunan kinerja dengan menyajikan data-data kinerja. Efisiensi penggunaan sumber daya, serta analisis terhadap program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja. Hasil capaian kinerja beserta evaluasi pada setiap sasaran strategis Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024.

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2024

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Katagori
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya derajat kesehatan mayarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	0,750	0,81	107,47%	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Kualitas Dan Daya Saing Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	Indeks	0,582	0,583	100,17%	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Indeks Pengeluaran	Indeks	0.715	0.73	102 %	Sangat Tinggi
4	Menurunnya Kemiskinan Dan Penganguran	Tingkat Kemiskinan	Nilai	5,47	5,66	96,64%	Sangat Tinggi
		Tingkat Pengguran Terbuka	Nilai	1,44	1,86	77,42%	Tinggi
5	Meningkatnya Produktivitas Sekor Perekonomian Unngulan Daerah	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	Nilai	4,64	1.05	22,63%	Sangat Rendah
		LPE Kategori Industry Pengelolaan	Nilai	5,34	4,50	84,27%	Tinggi
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68,05	65,95	96,91%	Sangat Tinggi
		Indeks Risiko	Indeks	162,00	168.00	96,43%	Sangat

		Bencana					Tinggi
7	Meningkatnya Kualitas Dan Pemerataan Infrastruktur	Indeks Infrastruktur	Indeks	63,33	55,40	87,48%	Tinggi
8	Meningkatnya Profesionalitas ASN Dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai AKIP	Nilai	B (68.01)	65,15	95,79%	Sangat Tinggi
		Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	58,10	74,04	127,44%	Sangat Tinggi
9	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Indeks Integritas	Indeks	81,71	75,41	92,29%	Sangat Tinggi
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	82,28	62,05	75,41%	Sedang
10	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik	Indeks	89,64	86,69	96,71%	Sangat Tinggi
11	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik	Indeks	2.60	2.32	82,23%	Tinggi

3.2 Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Sasaran Ke 1 Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

1. Indeks Kesehatan

Indeks kesehatan adalah ukuran kesehatan yang diukur pada tingkat pemerintah daerah, regional, dan nasional. Indeks ini dapat digunakan untuk membandingkan kesehatan antar wilayah geografis dan topik kesehatan. Indeks kesehatan dapat digunakan untuk, Mengetahui status kesehatan masyarakat, Mengetahui kemajuan pembangunan Kesehatan, mengetahui capaian kesehatan di tingkat wilayah, mengetahui perbandingan kesehatan antar wilayah geografis dan topik Kesehatan, mengetahui perbandingan kesehatan dari waktu ke waktu, mengetahui perbandingan kesehatan antar wilayah geografis dan topik kesehatan dari waktu ke waktu serta mendorong tindakan dan intervensi kesehatan masyarakat.

Dalam pengukuran Indeks Kesehatan, dilakukan menggunakan formula yang memasukkan komponen Angka Harapan Hidup (AHH) dengan Nilai Minimum dan Nilai Maksimum sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Tabel 3. 3 Indikator Kinerja Indeks Kesehatan Tahun 2023 s.d 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian	Tahun 2024		Capaian
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Kesehatan	Nilai	N/A	N/A	N/A	0,75	0,806	107,47%

Dari tabel di atas, diketahui capaian kinerja untuk indikator Indeks Kesehatan tahun 2024 memiliki capaian sebesar 107,47%, yang merupakan perbandingan atas target senilai 0,750 dengan realisasi senilai 0,806. Capaian terhadap Indeks Kesehatan tahun 2024 tidak dapat dibandingkan dengan capaian

kinerja tahun 2023. Hal ini dikarenakan indikator Indeks Kesehatan tidak terdapat pada tahun sebelumnya sebagaimana dokumen perencanaan berupa RPJMD Tahun 2018-2023.

Variabel yang digunakan untuk menghitung angka harapan hidup (AHH) adalah: Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR), Anak Lahir Hidup (ALH), Anak Masih Hidup (AMH). Faktor-faktor yang memengaruhi AHH, antara lain Variabel demografi, Status sosial ekonomi, Faktor Kesehatan, Perilaku Kesehatan, Akses perawatan Kesehatan dan Lingkungan sosial/fisik. Tercapainya target kinerja tahun 2024 atas indikator kinerja indeks Kesehatan ini mengindikasikan bahwa secara umum infrastruktur dan layanan medis yang cukup luas dan memadainya jumlah tenaga medis di Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 3. 4 Efisiensi Sumber Daya Sasaran Strategis Indikator Kesehatan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	0.750	0.806	107,47%	Rp.86.986.358.559	Rp.60.144.804.263	60,90%	20% (35,66%)

Dari hasil pengukuran yang dilakukan pada tabel di atas, diketahui pada sasaran strategis 1 (satu) tingkat efisiensi dari seluruh indikator kinerja sasaran adalah sebesar 20%. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian kinerja pada sasaran strategis 1 (satu) beserta alokasi anggarannya telah **efisien**.

Sasaran Ke 2 Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Pendidikan Masyarakat

2. Indeks Pendidikan Indonesia

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen pengukur pendidikan. Indeks pendidikan adalah cerminan dari hasil pembangunan dibidang pendidikan yang mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang tercermin didalamnya sangat menentukan tingkat produktivitas suatu negara. Indeks pendidikan digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan sebagai salah satu variabel pembangunan manusia. Indeks pendidikan ini

merupakan penggabungan dua indikator pendidikan yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (BPS, 2021).

Peningkatan kualitas dan daya saing SDM diharapkan dapat mencetak generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, terampil, serta berkarakter. Statistik Pendidikan 2024 sebagai salah satu potret pendidikan Indonesia menggambarkan kondisi pendidikan Indonesia. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pendidikan antara lain tingkat penyelesaian pendidikan, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah. Indeks pendidikan diukur dengan angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS).

2.1 Indeks Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir

Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

**Tabel 3. 5 Sasaran Strategis Dinas Pendidikan Kab. Indragiri Hilir
Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Kualitas dan daya Saing Pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,582	0,583	100,17%

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Inhil Tahun 2024

a. Angka Rata-rata Lama sekolah (RLS)

Angka Rata-rata Lama sekolah (RLS) didefinisikan sebagai rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk berumur 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang pendidikan yang pernah dijalani. Berdasarkan perhitungan realisasi Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2024 Kabupaten Indragiri Hilir dengan target 7,50 terealisasi 7,32 dengan capaian 97,60 %. Yang berarti seorang anak dapat menyelesaikan pendidikan hingga tingkat Diploma II. Dimensi Pengetahuan Indikator yang menyusun dimensi pengetahuan adalah Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata Lama Sekolah digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Batasan lama sekolah untuk tiap jenjang adalah penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan selama 9 tahun, dan tamat SMA diperhitungkan selama 12 tahun. Lama sekolah tersebut tidak memperhitungkan apakah penduduk pernah tinggal kelas atau tidak.

Gambar 3. 1 Perbandingan capaian kinerja Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) se Provinsi Riau

Kabupaten/Kota	(Metode Baru) Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		
	2022	2023	2024
Karimun Singingi	5,75	5,80	5,84
Indragiri Hulu	5,10	5,12	5,10
Indragiri Hilir	7,25	7,31	7,32
Pelalawan	8,79	8,79	8,88
Sikok	9,57	9,88	9,90
Kampar	9,39	9,40	9,50
Governor Hilir	8,55	8,51	8,84
Bengkalis	8,71	8,71	8,71
Rocan Riut	6,20	6,52	6,50
Kepulauan Meranti	7,88	7,66	8,12
Pelantikan	11,80	11,81	11,80
Kuala	10,10	10,10	10,29
Riau	7,32	8,57	8,45

Sumber : BPS Provinsi Riau Tahun 2024

Dapat diketahui bahwa dari gambar tabel 2.1 di atas dapat diindikasikan bahwa capaian kinerja angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Kabupaten Indragiri Hilir berada pada dilevel terendah diantara 12 (dua belas) Kabupaten/Kota se Provinsi Riau, artinya hal ini membutuhkan perhatian dan strategi khusus dalam menekan angka yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir khususnya Dinas Pendidikan sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) yang mengampu amanah yang telah diikat dengan perjanjian kinerja kepada kepala daerah.

b. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah merefleksikan kemampuan masyarakat untuk mengakses pendidikan, khususnya pendidikan formal. HLS menggambarkan kesempatan yang dimiliki masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan formal, sedangkan RLS menggambarkan stok modal manusia yang dimiliki oleh suatu wilayah. Harapan Lama Sekolah adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak yang berumur 7 tahun. Untuk rumus indeks Harapan lama sekolah adalah sebagai berikut:

HLS_a^t : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

FK : Faktor koreksi pesantren

E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

i : usia ($a, a+1, \dots, n$)

Sumber : BPS Propinsi Riau Tahun 2024

Gambar 3. 2 Perbandingan Capaian Kinerja Harapan Lama Sekolah (RLS) se Provinsi Riau

Kabupaten/Kota	[Metode Baru] Harapan Lama Sekolah [Tahun]		
	2022	2023	2024
Kabupaten Bengkalis	10,14	10,27	10,11
Indragiri Hilir	12,00	12,59	12,00
Indragiri Hulu	12,75	12,20	12,71
Kepulauan	12,43	12,40	12,51
Kota	12,00	12,54	12,08
Kutai	10,50	10,49	10,51
Kota Lela	12,34	12,31	12,34
Bengkalis	13,06	13,34	13,44
Kota Hilir	12,50	12,56	12,51
Kota-kota Kuantan	12,34	12,56	12,57
Perbandingan	15,56	15,58	15,84
	15,32	15,33	15,35
	13,28	13,30	13,42

$$HLS_a^t = FK \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 s.d 2024

Berdasarkan defenisi angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) tersebut maka dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 3. 6 Target Dan Realisasi Perbandingan Capaian Kinerja Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir 2023 s.d 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023			Target 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,86	7,31	93	7,50	7,32	97,60
2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,56	12,20	90	12,50	12,21	97,68

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2023 s.d 2024

Berdasarkan Tabel di atas, Rata-rata lama sekolah (RLS) dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja dari ditetapkan pada tahun 2024 dengan target 7,50 dengan realisasi sebesar 7,32 dengan capaian 97,60 % dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir belum dapat memenuhi angka target

yang telah ditetapkan sesuai dengan Perjanjian Kinerja. Sedangkan Harapan Lama Sekolah juga belum dapat memenuhi sesuai dengan yang ditargetkan dari 12,50 hanya tercapai pada angka 12,21 dengan capaian realisasi 97,68. UNDP menentukan nilai minimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 0 tahun dan nilai tertinggi adalah 15 tahun. Indikator yang juga digunakan untuk menyusun dimensi pengetahuan adalah Harapan lama Sekolah. Harapan Lama Sekolah adalah lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Penghitungan Harapan Lama Sekolah dikhususkan untuk penduduk usia 7 tahun ke atas. Indikator ini digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan berbasis jenjang. Untuk rumus indeks rata-rata lama sekolah adalah sebagai berikut:

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

Tabel 3. 7 Perbandingan Capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (2021)	Tahun (2022)	Tahun (2023)	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Targ et	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkat nya mutu/ kualitas Pendidikan masyarakat	Rata- rata lama sekolah	7.24	7.26	7.31	7.50	7,32	97,60
		Harapan lama sekolah	11.93	12.19	12.20	12.50	12,2 1	97,68

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Inhil Tahun 2024

Tabel 3. 8 Kategori Pencapaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

2.2 Rencana dan Realisasi Anggaran

Rencana Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan berjumlah sebesar Rp. 181.118.335.617.- (seratus delapan puluh satu milyar seratus delapan belas juta tiga ratus tiga puluh lima enam ratus tujuh belas rupiah) yaitu Program Pengelolaan Pendidikan yang terdiri dari Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 165.836.425.628,86 (Seratus enam puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh enam juta empat ratus dua puluh lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu delapan puluh enam rupiah) dengan persentase capaian sebesar 91,56 %.

2.3 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir memiliki 14 sasaran strategis dengan 12 sasaran strategis yang belum tercapai dan 2 sasaran strategis yang belum teralisasi.
2. Analisa Faktor penghambat keberhasilan Indikator Kinerja :
 - (1) Pendidikan bermutu itu mahal perlu biaya yang tinggi. Kalimat ini sering muncul untuk menjustifikasi mahal nya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga ke tingkat yang lebih tinggi membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan lain kecuali tidak bersekolah.
 - (2) Belum tercapainya APM SD/MI dan SMP/MTs hal ini di sebabkan masih adanya Siswa baru Kelas 1 SD/MI kurang dari 7 tahun serta anak usia 12

tahun sudah memasuki SMP/MTS, dan anak usia kurang dari 13 tahun sudah masuk jenjang SMP/MTs serta anak usia 15 sudah memasuki jenjang sekolah menengah.

- (3) Masih adanya guru yang belum berkualifikasi minimal S1/D.IV, terutama di Jenjang TK dan SD sebagian belum berijazah Sarjana
 - (4) memerlukan solusi holistik dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.
 - (5) Anak-anak cenderung hanya menyelesaikan pendidikandasar tanpa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga RLS tetap rendah
3. Angka Melanjutkan sekolah mengalami penurunan pada tahun 2024 yang disebabkan :
- a) Beberapa keluarga mungkin tidak mampu membiayai pendidikan anak ke tingkat lebih tinggi, terutama jika mereka harus membeli seragam, buku, atau biaya transportasi.
 - b) Di daerah tertentu, anak-anak mungkin terpaksa membantu perekonomian keluarga dengan bekerja.
4. Angka Partisipasi sekolah mengalami penurunan pada tahun 2024 disebabkan:
- a) Banyak keluarga tidak mampu membiayai kebutuhan pendidikan, seperti seragam, buku, atau transportasi.
 - b) Program bantuan pendidikan, seperti beasiswa atau Kartu Indonesia Pintar (KIP), mungkin tidak menjangkau seluruh anak yang membutuhkan.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, berbagai solusi dapat diterapkan, baik melalui kebijakan pemerintah maupun partisipasi masyarakat
- a) Memerlukan solusi holistik dan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.

- b) Untuk meningkatkan harapan lama sekolah,berbagai solusi dapat diterapkan, baik melalui kebijakan pemerintah maupun partisipasi masyarakat
2. Pengembangan pendidikan anak usia dini baik kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran
 3. Penambahan ruang kelas sekolah dan rehab bagi ruang kelas sekolah yang rusak sedang /berat
 4. Penambahan ruang bermain yang ramah anak untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan anak usia dini
 5. Pembinaan bakat, minat dan kreatifitas siswa
 6. Mengoptimalkan program wajib belajar 12 tahun
 7. Meningkatkan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan dengan melaksanakan PPPK berdasarkan kebutuhan sekolah
 8. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan gedung yang representative
 9. Peningkatan budaya Literasi untuk meningkatkan minat baca masyarakat
 - 10.Adanya program sertifikasi guru yang mensyaratkan pendidikan minimal S1/D.IV bagi guru untuk dapat mengikuti program tersebut
 - 11.Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Tabel 3. 9 Efisiensi Sumber Daya Sasaran Strategis Indeks Pendidikan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas dan daya saing pendidikan masyarakat	0.582	0.583	100,17%	Rp.172,93 2,717,711	Rp.91,831, 488,540	53%	20% (46,99%)

Dari hasil pengukuran yang dilakukan pada tabel di atas, diketahui pada sasaran strategis 2 (dua) tingkat efisiensi dari seluruh indikator kinerja sasaran adalah sebesar 20%. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian kinerja pada sasaran strategis 2 beserta alokasi anggarannya telah **efisien**.

3. Indeks Pengeluaran

Indeks Pengeluaran merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk menghitung tingkat IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di suatu daerah. Komponen IPM sendiri terdiri dari indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran.

Indeks pengeluaran erat hubungannya dengan nilai angka pengeluaran per kapita di suatu daerah.

Pengeluaran Per Kapita menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) riil yang disesuaikan. BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

Angka Pengeluaran Perkapita (APP) merupakan angka pengeluaran rata-rata yang menggambarkan biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan, baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

**Tabel 3. 10 Capaian Kinerja Indikator Indeks Pengeluaran Kabupaten
Indragiri Hilir Tahun 2023-2024**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian (%)	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Indeks Pengeluaran	Persen tase	-	-	-	0,72	0,732	101 %

Sumber:

Capaian angka indikator indeks pengeluaran pada tahun 2024 adalah 0,732 dari target 0,72 dengan capaian 101%. Data tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena indikator yang digunakan pada tahun sebelumnya berbeda.

**Gambar 3. 3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Indragiri Hilir
Tahun 2020-2024**

Tahun Year	UHH ¹ Life Expectancy	HLS/EYS ²	RLS/MYS ³	Pengeluaran per Kapita Per Capita Expenditure	IPM/HDI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2020	72,03	11,91	7,23	9.954	68,43
2021	72,11	11,93	7,24	9.945	68,49
2022	72,19	12,19	7,26	10.234	69,12
2023	72,27	12,20	7,31	10.659	69,64
2024	72,39	12,21	7,32	11.050	70,07

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pengeluaran per kapita yang terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir sangat mempengaruhi nilai Indeks Pembangunan Manusia di luar nilai usia harapan hidup, harapan lama sekolah dan nilai rata lama sekolah.

Besarnya nilai angka pengeluaran per kapita suatu daerah menunjukkan tingkat ekonomi masyarakat di tempat tersebut, dari hasil tabel diatas dapat dilihat jika pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir mengalami tren kenaikan yang cukup positif.

Tabel 3. 11 Sasaran Strategis Indeks Pengeluaran Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	0.715	0,730	102%	Rp.18,814,823,720	Rp.4.955.130.369	26,34%	20% (74,18%)

Dari hasil pengukuran yang dilakukan pada tabel di atas, diketahui pada sasaran strategis 3 (tiga) tingkat efisiensi dari seluruh indikator kinerja sasaran adalah sebesar 20%. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian kinerja pada sasaran strategis 3 (tiga) beserta alokasi anggarannya telah **efisien**.

Sasaran Ke 4 Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran

4.1 Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Secara kuantitatif, kemiskinan merupakan suatu keadaan, yang mana taraf hidup manusia serba kekurangan atau tidak memiliki harta benda. Sedangkan secara kualitatif, pengertian kemiskinan adalah keadaan hidup manusia yang tidak layak.

Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perbulan di bawah garis kemiskinan, Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan.

Tabel 3.12 Capaian Tingkat Kemiskinan Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023			Target 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat Kemiskinan	Persentase	5,00	5,64	88,65	5,47	5,66	96,64 %

Sumber : Data BPS.Kab. Inhil 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menargetkan tingkat kemiskinan sebesar 5,47%, sedangkan realisasi tingkat kemiskinan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 5,66 %, maka tingkat capaian kinerja berada pada 96,64 %. Bila membandingkan realisasi kinerja dan capaian kinerja antara tahun 2023 dan tahun 2024 dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 0,35% dari semula 5,64% tahun 2023 menjadi 5,66% tahun 2024. Sedangkan untuk tingkat capaian kinerja mengalami peningkatan sebesar 9,01% dari semula 88,65% tahun 2023 menjadi 96,64% tahun 2024.

Berdasarkan *release* data Profil Kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir, bahwa persentase angka kemiskinan Kabupaten Indragiri Hilir dari Tahun 2018 s/d 2024 secara umum mengalami penurunan baik dari segi persentase maupun dari segi jumlah, terkecuali pada tahun 2021 dan 2024. Kenaikan persentase penduduk miskin pada tahun 2021 disebabkan karena adanya kejadian luar biasa *covid 19* yang melanda Indonesia tak terkecuali Kabupaten Indragiri Hilir. Sementara kenaikan persentase penduduk miskin pada tahun 2024 dipicu karena kenaikan harga barang kebutuhan pokok dan faktor alam seperti banjir, badai elnino, hama kumbang dan lain-lain.

Bila mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026, pada tahun 2025 dan 2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah menargetkan tingkat kemiskinan sebesar 5,24 % dan 5,00%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2024, maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan

sebesar 0,23% pada tahun 2025 dan 0,24% pada tahun 2026. Bila melihat trend tingkat kemiskinan dari tahun 2018 s/d 2024, bila tidak terjadi kejadian wabah luar biasa dan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok yang signifikan, maka target penurunan tingkat kemiskinan pada tahun 2025 dan 2026 oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir masih mungkin akan tercapai.

Peningkatan jumlah angka kemiskinan di Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2024 disebabkan beberapa hal, antara lain:

1. Adanya bencana banjir yang melanda pemukiman dan perkebunan milik masyarakat yang terjadi pada beberapa kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Kejadian gagal panen yang terjadi di beberapa daerah di Kabupaten Indragiri Hilir disebabkan karena hama kumbang dan kondisi alam yang anormal ;
3. Kenaikan harga bahan makanan dan non makanan disebabkan karena inflansi; dan
4. Meningkatnya pengangguran akibat terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terus berupaya mencari alternatif solusi dalam menurunkan tingkat kemiskinan dengan melakukan kegiatan yang memiliki dampak secara langsung terhadap pengentasan kemiskinan, yaitu :

1. Memberikan masyarakat rentan akses terhadap pekerjaan yang layak dan pendapatan yang stabil, serta memberikan bantuan keuangan kepada mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka;
2. Memberikan akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi semua orang, sehingga setiap individu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk meningkatkan peluang ekonomi masa depan mereka;
3. Memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, termasuk akses terhadap layanan kesehatan dasar, vaksinasi, dan perawatan kehamilan, dapat mengurangi angka kematian dan penyakit yang terkait dengan kemiskinan; dan
4. Meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, listrik dan transportasi, sehingga masyarakat mempunyai akses yang lebih baik terhadap fasilitas yang mendukung kehidupan sehat dan produktif.

4.2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: (1) penduduk yang aktif mencari pekerjaan, (2) penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, (3) penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, (4) kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tabel 3. 13 Capaian Indikator Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2023-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023			Target 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	3,00	1,71	57 %	1,44	1,86	129 %
Sumber : Data BPS.Kab. Inhil 2024								

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran terbuka kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 realisasi sebesar 1,71%. Dengan capaian sebesar 57 % Jika dibandingkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Indragiri Hilir di tahun 2024 TPT sebesar 1,86 %.mengalami kenaikan capaian realisasi sebesar 0,15 %.

Adapun penyebab tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan disebabkan beberapa faktor adalah pertumbuhan ekonomi, upah, inflasi, dan ketidakseimbangan antara lapangan pekerjaan dan jumlah tenaga kerja.

Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat memberikan solusi dalam rangka Menurunkan tingkat pengangguran terbuka, melalui :

1. Membuka pintu investasi sehingga banyak orang berusaha membuka lapangan kerja, caranya yaitu berinvestasi sektor riil misalnya: sektor produksi, property, perkebunan, jasa dan lain-lain;
2. Memberi peluang masyarakat sebagai wirausaha melalui pembinaan dan pengembangan UMKM; dan
3. Memberi kesempatan bagi pencari kerja untuk dilatih pada Balai Latihan Kerja (BLK).

Tabel 3. 14 Sasaran Strategis Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menurunnya kemiskinan dan Pengangguran	5.47	5.66	96,64%	Rp.18,814,823,720	Rp.4.955.130.369	26,34%	20% (72,07%)
		1.44	1.86	77,42%	Rp.2,122,656,603	Rp.582,279,362	27,43%	

Dari hasil pengukuran yang dilakukan pada tabel di atas, diketahui pada sasaran strategis 4 (empat) tingkat efisiensi dari seluruh indikator kinerja sasaran adalah sebesar 20%. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian kinerja pada sasaran strategis 4 (empat) beserta alokasi anggarannya telah **efisien**.

Sasaran Ke 5 Meningkatnya Produktivitas Sektor Perekonomian Unggulan Daerah

5.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan

Laju Pertumbuhan Ekonomi kategori ini mencakup segala pengusaha yang didapatkan dari alam dan merupakan benda-benda atau barang biologis (hidup) yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri atau untuk dijual kepada pihak lain. Pengusaha ini termasuk kegiatan yang tujuan utamanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri (subsisten) seperti pada kegiatan usaha tanaman pangan. Data produksi kategori ini diperoleh dari

Fungsi Statistik Produksi BPS Kabupaten Indragiri Hilir dan data eksternal BPS. Sedangkan data struktur biaya kegiatan tanaman pangan diperoleh dari hasil Sensus Pertanian dan Survei Struktur Ongkos Usaha Tani (SOUT) yang dilakukan oleh Subdit Statistik Tanaman Pangan BPS. Pendekatan yang digunakan dalam memperkirakan nilai tambah Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah melalui pendekatan produksi. Pendekatan didasarkan pada pertimbangan ketersediaan data produksi dan harga untuk masing-masing komoditi pertanian, kehutanan dan perikanan.

Tabel 3. 15 Indikator Kinerja LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2023-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian	Tahun 2024		Capaian
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	LPE Kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persentase	N/A	2,96	N/A	4,64	1,05	22,63%

Berdasarkan tabel di atas pada tahun 2024 dapat dilihat target laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 4,64%, bila melihat realisasi berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 1,05%, maka capaian kinerja hanya sebesar 22,63%. Perbandingan realisasi kinerja antara tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 64,53%, semula 2,96% tahun 2023 menjadi 1,05% tahun 2024. Namun untuk membandingkan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun 2024 tidak dapat dilakukan karena tidak tersedianya data terkait target laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2023.

Berdasarkan data *release* Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir tentang Produk Domestik Bruto Kabupaten Indragiri Hilir Menurut Lapangan Usaha 2019-2023 Volume 11 Tahun 2024, bahwa persentase laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dari Tahun 2019 s/d 2023 secara umum cenderung mengalami kenaikan, terkecuali pada tahun 2020 dan

2023. Bila mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026, dimana pada tahun 2025 dan 2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah menargetkan laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 5,81% dan 6,09%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2024, maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menargetkan kenaikan laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 1,17% pada tahun 2025 dan 0,28% pada tahun 2026. Bila melihat trend laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan dari tahun 2019 s/d 2024, bila dilakukan upaya-upaya peningkatan produktifitas sebagai berikut :

- a. Meningkatkan hasil pertanian, kehutanan dan perikanan dengan menggunakan bibit unggul, pemupukan, pengendalian hama, dan pengairan yang baik;
- b. Memperluas lahan pertanian, kehutanan dan perikanan baru, seperti membuka hutan, semak belukar, dan rawa-rawa;
- c. Memperbanyak jenis usaha atau jenis komoditas pada pertanian, kehutanan dan perikanan;
- d. Merehabilitasi lahan pertanian, kehutanan dan perikanan yang rusak atau belum dimanfaatkan;
- e. Menggunakan mesin-mesin pertanian, kehutanan dan perikanan yang modern; dan
- f. Memberikan pelatihan, penyuluhan, atau kegiatan pendidikan bidang pertanian, kehutanan dan perikanan.

Maka target laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yang telah ditetapkan pada tahun 2025 dan 2026 oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam dokumen rencana pembangunan daerah masih mungkin akan tercapai.

Rendahnya ketercapaian kinerja laju pertumbuhan ekonomi kategori pertanian, kehutanan dan perikanan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat disebabkan beberapa faktor, antara lain :

1. Adanya serangan hama kumbang di beberapa kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir, seperti Kecamatan Pelangiran, Desa Pengalihan Enok dan Desa Bente, sehingga menyebabkan beberapa komoditas perkebunan seperti Kelapa Dalam dan Kelapa Hibrida mengalami penurunan produksi;
2. Penurunan beberapa komoditas perkebunan disebabkan karena dampak perubahan iklim dan siklus buah yang mengalami masa trek;
3. Penurunan produksi Tanaman Sagu yang berasal dari Batang Pati Sagu diakibatkan berkurangnya luasan lahan tanam;
4. Penurunan produksi tanaman hortikultura diakibatkan meluasnya dampak banjir yang terjadi di beberapa kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir;
5. Penurunan tangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan karena badai el nino; dan
6. Rusaknya tambak budi daya perikanan disebabkan karena banjir.

Beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kembali produksi di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan, antara lain:

1. Melakukan penambahan luasan lahan tanam, sehingga dapat menghasilkan jumlah produksi yang semakin besar;
2. Melakukan riset pertanian, kehutanan dan perikanan untuk menghasilkan produk-produk apa saja di bidang pertanian, kehutanan dan perikanan yang dapat ditanam dan menghasilkan produksi yang tinggi;
3. Adanya strategi jangka panjang terhadap sektor-sektor yang menjadi unggulan daerah, khususnya kategori pertanian, kehutanan dan perikanan; dan
4. Adanya *roadmap* mitigasi bencana sehingga dapat segera dilakukan langkah-langkah antisipasi terhadap bencana-bencana yang akan terjadi.

5.2 Industri Pengolahan.

Kategori Industri Pengolahan meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Bahan baku industri pengolahan berasal dari produk pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan atau penggalian seperti produk dari kegiatan industri pengolahan lainnya Perubahan, pembaharuan atau rekonstruksi

yang pokok dari barang secara umum diperlakukan sebagai industri pengolahan. Unit industri pengolahan digambarkan sebagai pabrik, mesin atau peralatan yang khusus digerakkan dengan mesin dan tangan. Termasuk kategori industri pengolahan adalah perubahan bahan menjadi produk baru dengan menggunakan tangan, kegiatan maklon atau kegiatan penjualan produk yang dibuat di tempat yang sama dimana produk tersebut dijual dan unit yang melakukan pengolahan bahan-bahan dari pihak lain atas dasar kontrak.

Tabel 3. 16 Indikator Kinerja LPE Industri Pengolahan Tahun 2023-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian	Tahun 2024		Capaian
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	LPE Industri Pengolahan	Nilai	N/A	N/A	N/A	81,71	86,44	105,79%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja LPE Industri Pengolahan Tahun 2024 adalah sebesar 105,79% dengan target senilai 81,71 dan realisasi senilai 86,44. Hal ini mengindikasikan bahwa LPE Industri Pengolahan sebagai indikator kinerja utama telah melebihi target yang ditetapkan. LPE Industri Pengolahan tidak dapat dilakukan perbandingan dengan capaian pada tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya perubahan dokumen pembangunan daerah jangka menengah dari periode sebelumnya terdapat pada RPJMD Tahun 2018-2023 menjadi RPD Tahun 2024-2026.

Dari hasil capaian, terlihat kinerja sektor industri pengolahan cenderung baik. Capaian yang sangat tinggi untuk indikator kinerja LPE Industri Pengolahan mengindikasikan bahwa telah terjadi industrialisasi sektoral di Kabupaten Indragiri Hilir. Perkembangan industri pengolahan ini bersumber dari industrialisasi kelapa sebagai produk unggulan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 3. 17 Sasaran Strategis LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan & LPE Kategori Industri Pengolahan Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perekonomian Unggulan Daerah	4.64	1.05	22,63%	Rp.15.006.665.516	Rp.7.938.975.613	52,90%	1,02%
		5.34	4.50	84,27%				

Dari hasil pengukuran yang dilakukan pada tabel di atas, diketahui pada sasaran strategis 5 (lima) tingkat efisiensi dari seluruh indikator kinerja sasaran adalah sebesar 1,02%. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian kinerja pada sasaran strategis 5 (lima) beserta alokasi anggarannya telah **efisien**.

Sasaran Ke 6 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketahanan Bencana

6.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

6.1.2 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir selaku unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang urusan lingkungan hidup dan kebersihan, berkewajiban untuk melakukan akuntabilitas kinerja melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan di tingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan

lingkungan, serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Bupati Indragiri Hilir pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 dengan target indikator **68,05** dan dapat dilihat dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 18 Perjanjian Kinerja Bupati Indragiri Hilir Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023			Target 2024		
				Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67.66	58.13	85.91	68.05	65.95	96,91

Sumber : DLHK Kab. Inhil 2024

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 11 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024, disimpulkan dengan nilai dengan target 68.05 dan terealisasi 65.95 dengan capaian rata-rata 96,91% yang berada pada skala ≥ 90 yang tergolong Sangat Tinggi. Capaian Indikator Kinerja ditahun 2024 mengalami peningkatan secara signifikan dibandingkan dari tahun 2023 sebesar 11 % jika dibandingkan dengan target ditahun 2023 dengan target 67.66 dan realisasi 58.13 dengan realisasi 85.91.

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan indikator kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebagaimana terdapat pada Pasal 13 Ayat (1),(2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

- (1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. penanggulangan; dan
 - c. pemulihan.
- (3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.

Tabel 3. 19 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$	
2	Tinggi	$76 \leq 90$	
3	Sedang	$66 \leq 75$	
4	Rendah	$51 \leq 65$	
5	Sangat Rendah	≤ 50	

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

6.1.2 Hasil Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Tabel 3. 60 Hasil Capaian Index Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

IKA	IKU	IKL
48,62	92,19	47,19

6.1.3 Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH :

6.1.3.1 Indeks Kualitas Udara (IKU)

IKU (Indek Kualitas Udara) adalah alat ukur sederhana berupa angka untuk memberikan informasi kualitas udara ambien suatu daerah dan dapat dimanfaatkan sebagai perlindungan kesehatan untuk membantu warga dalam menjaga kesehatan dengan membatasi kegiatan di luar ruangan saat polusi udara sedang meningkat.

Indeks Kualitas / Pencemaran Udara (bobot 0,405), yang diukur berdasarkan parameter-parameter SO₂ dan NO₂. Data yang digunakan adalah data hasil pemantauan kualitas udara *ambient* dengan metode *passive sampler* di Kabupaten Indragiri Hilir.

**Tabel 3. 21 Capaian Indikator Sasaran Strategis Indeks Kualitas Udara (IKU)
Tahun 2023-2024**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023			Target 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kualitas Udara	Indeks	90.61	85,34	94.18	90,71	92,19	102

Sumber : LKJiP DLHK tahun 2024

IKU pada tahun 2024 dengan target 90,71 % dengan realisasi 92,19 % dengan capaian 102 %. Capaian kinerja pada tahun 2024 mengalami peningkatan dari tahun 2023 sebesar 7,82 %, nilai IKU yang telah diperoleh juga menggunakan Aplikasi IKLH. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas

Udara (IKU) tahun 2024 maka digolongkan realisasi capaian kinerja **sangat tinggi**.

- a. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan Program yang menunjang tercapainya indikator Indeks Kualitas Udara (IKU) antara lain:
- 1) Penegakan hukum
 - 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
 - 3) Pengendalian kebakaran hutan dan lahan
 - 4) Pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat
 - 5) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indragiri Hilir (KEHATI)
 - 6) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
 - 7) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
 - 8) Program Pengelolaan Persampahan

6.1.3.2 Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas/ Pencemaran Air (0,219), yang diukur berdasarkan parameter-parameter DO, TSS, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform. Data yang digunakan adalah data hasil pemantauan kualitas air sungai di Kabupaten Indragiri Hilir. Indeks Kualitas Air yang selanjutnya disingkat IKA adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup parameter yang digunakan dalam perhitungan IKA antara lain derajat keasaman (pH), oksigen terlarut (DO), kebutuhan oksigen biologi (BOD), kebutuhan oksigen kimiawi (COD), padatan tersuspensi total (TSS), nitrat (NO₃-N), Total fosfat (T- Phospat) dan Fecal coliform (Fecal Coli). Pemantauan kualitas air di kabupaten Indragiri Hilir dilakukan di sungai yang mengalir di kabupaten Indragiri Hilir sebanyak 44 titik sampel yang diambil secara periodik.

Perbandingan realisasi kinerja indikator IKA dari beberapa tahun terakhir mengalami penurunan kualitas air. Hal tersebut disebabkan perubahan cara perhitungan IKA pada setiap tahun yang dibandingkan dan proses pengujian sampel yang dilakukan.

Tabel 3. 22 Capaian Indikator Sasaran Strategis Indeks Kualitas Air (IKA) Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023			Target 2024		
			Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Indeks Kualitas Air	Indeks	53.78	35.10	65,27	56,45	48,62	86,12

Sumber : LKJiP DLHK tahun 2024

IKA (Indeks Kualitas Air) merupakan salah satu komponen dalam pemenuhan Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Indragiri Hilir yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023 dengan capaian kinerja sebesar 65,27 % dengan target 53,78 % dan terealisasi 35,10 % di tahun 2023. Sementara target pada tahun 2024 menjadi meningkat jika dibandingkan dari tahun 2023 dengan selisih sebesar 2,67 %.

Capaian kinerja pada tahun 2024 IKA mengalami penurunan capaian indikator strategis indeks IKA dengan target 56,45 dan terealisasi 48,62 %. Berdasarkan Capaian tersebut indeks IKA mengalami penurunan dengan selisih angka sebesar 13,52 % dibandingkan realisasi IKA pada tahun 2023.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan :

Penurunan nilai capaian Indeks Kualitas Air (IKA) disebabkan adanya data hasil pengujian pada semester II yang tidak bisa di verifikasi, karena tidak semua parameter wajib diuji, yaitu parameter pH dan DO. Untuk parameter lapangan pH dan DO harus dilakukan secara onsite/ diambil dilapangan pada saat pengambilan sampel oleh pihak laboratorium, sesuai lampiran II

P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10.2020 sebagai persyaratan tambahan laboratorium lingkungan. Untuk menindak lanjuti masalah ini dapat dilakukan budget sharing dengan pihak laboratorium lingkungan untuk melaksanakan pengambilan dan pengujian kualitas air sungai.

- b. Rekomendasi untuk peningkatan Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:
- 1) Meningkatkan komitmen terhadap kegiatan pengendalian pencemaran air; Meningkatkan peran dunia usaha dalam pelaksanaan pembuangan air limbah ke badan air sesuai dengan perizinan dengan mempertimbangkan alokasi beban pencemar;
 - 2) Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik dan USK khususnya untuk masyarakat;
 - 3) Meningkatkan pengawasan terhadap pembuangan air limbah USK atau limbah domestik;
 - 4) Meningkatkan pelibatan masyarakat, usaha dan/atau kegiatan, serta lembaga K/L lain terhadap usaha peningkatan kualitas air;
 - 5) Meningkatkan koordinasi dalam perencanaan, penyiapan data dan upaya antara pusat dan daerah.

6.1.4 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Indeks Kualitas Air

Program yang menunjang tercapainya indikator Indeks Kualitas Air (IKA) antara lain:

- 1) Membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
- 2) Menetapkan regulasi dan standar kualitas air
- 3) Melakukan pengawasan dan penegakan hukum
- 4) Koordinasi lintas sektor pemerintah daerah untuk mengendalikan pencemaran air
- 5) Memberikan sanksi kepada perusahaan yang mencemari air

Indeks Tutupan Hutan /Lahan (bobot 0,219), yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi. Data yang digunakan adalah data hasil

analisis tutupan lahan berdasarkan citra satelit Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibandingkan dengan analisis data tutupan lahan di Indragiri Hilir.

Tabel 3. 23 Capaian Indikator Sasaran Strategis Indeks Kualitas Lahan (IKL) Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023			Target 2024		
			Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	49.05	47,38	96.60	50,45	47,19	93,53

Sumber : LKJiP DLHK tahun 2024

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2024 tidak mencapai target dari sebagaimana target yang telah ditetapkan sebesar 50,45 % dengan realisasi sebesar 47,19 %. Untuk pencapaian kinerja pada RPJMD digolongkan sangat tinggi. Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) tahun 2023 mengalami penurunan dari 47,38 di tahun 2023 menjadi 47,19 pada tahun 2024.

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan antara lain : Penurunan pada nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) dapat disebabkan perubahan fungsi dan tutupan lahan pada beberapa lokasi RTH,
- solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan cara merencanakan pergantian lokasi RTH yang tidak sesuai dan inventarisasi lokasi RTH yang sudah ditetapkan.

6.1.5 Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Program yang menunjang tercapainya indikator Indeks Kualitas Lahan (IKL) antara lain:

- 1) Program Perencanaan Lingkungan Hidup
- 2) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 3) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Indragiri Hilir (KEHATI)

- 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
- 5) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
- 6) Program Pengelolaan Persampahan

Berdasarkan rumus terbaru tentang perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024, dapat dilihat melalui perhitungan sebagai berikut :

Diketahui IKA= 48,62 IKU= 92,19 IKL= 47,19

$$\begin{aligned}
 \text{Rumus} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL}) \\
 &= (0,376 \times 48,62) + (0,405 \times 92,19) + (0,219 \times 47,19) \\
 &= (18,281) + (37,336) + (10,334) \\
 &= \mathbf{65,95}
 \end{aligned}$$

Tabel Predikat Penilaian IKLH

No	Predikat	Kisaran Nilai IKLH
1	Sangat Baik	$\text{IKLH} > 80$
2	Baik	$70 < \text{IKLH} \leq 80$
3	Cukup Baik	$60 < \text{IKLH} \leq 70$
4	Kurang Baik	$50 \leq \text{IKLH} \leq 60$
5	Sangat Kurang Baik	$40 \leq \text{IKLH} < 50$
6	Waspada	$30 \leq \text{IKLH} < 40$

Sumber: IKLH 2018, Kementerian Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil perhitungan yang terdapat pada Skala Nilai Peringkat Kinerja aplikasi yang bersumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dengan Demikian IKLH untuk Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 dengan nilai 65,95 dan dikategorikan **“CUKUP BAIK”**

6.1.6 Realisasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagai penunjang program Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Terdiri dari Belanja Program Indeks Kualitas Air, belanja program Pemulihan

Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Belanja program Indeks Kualitas Lahan Rp. 989.617.000,- terealisasi Rp. 894.858.734,- dengan capaian 90,42 %.

6.1.7 Faktor-Faktor Penghambat Keberhasilan Kinerja

Secara umum faktor-faktor penghambat keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk pencapaian RTH sampai saat ini hanya pada RTH yang sudah terbangun di Kabupaten Indragiri Hilir (Ibu Kota Kecamatan) dari 20 (dua puluh) Kecamatan yang ada di kabupaten Indragiri Hilir;
- b. Status lahan RTH di kecamatan, belum semua bersertifikat/ belum memiliki surat kepemilikan lahan;
- c. Pelayanan persampahan saat ini baru terlaksana 2(dua) kecamatan 5 (lima) kelurahan dari 20 (dua puluh) kecamatan di kabupaten Indragiri Hilir;
- d. Masih minimnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah di kabupaten Indragiri Hilir
- e. Masih kurangnya SDM di bidang pengelolaan sampah
- f. Masih kurangnya implementasi terhadap peraturan tentang Pengelolaan Sampah yang ada dan masih minimnya regulasi pengelolaan sampah.

6.1.8 Rekomendasi Langkah-Langkah Perbaikan

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN adalah sebagai berikut:

- 1) Diperlukan penambahan parameter pemantauan kualitas air sungai, khususnya di Daerah aliran sungai yang memiliki aktifitas domestik dan industri yang tinggi;
- 2) Mensosialisasikan kepada masyarakat yang berada di daerah aliran sungai terkait kualitas air sungai dan memberikan edukasi tentang pengelolaan limbah domestik;
- 3) Memperluas cakupan pelayanan pengelolaan sampah;

- 4) Perlu adanya peningkatan prasarana dan sarana pengelolaan sampah di kabupaten Indragiri Hilir (penambahan kendaraan dokumen master plan operasional sampah, penyusunan persampahan di Kabupaten Indragiri Hilir);
- 5) Revisi Dokumen Amdal, peningkatan pengelolaan sampah di TPA;
- 6) Peningkatan SDM dalam pengelolaan sampah; Perlunya peningkatan sosialisasi dan edukasi pengelolaan sampah di setiap kecamatan dalam upaya untuk pelimpahan kewenangan pengelolaan sampah di kecamatan;
- 7) Menyusun rencana aksi tindaklanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

6.2 Indeks Resiko Bencana

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan risiko bencana alam yang tinggi. Berada di cincin api Pasifik, Indonesia sering dilanda berbagai jenis bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, dan tsunami. Oleh karena itu, kesiapsiagaan masyarakat menjadi aspek yang sangat penting dalam menekan angka indeks risiko bencana di negara ini.

Indeks Risiko Bencana adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana. Angka ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kerentanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Dalam konteks ini, kesiapsiagaan masyarakat merupakan salah satu pilar utama yang dapat mengurangi risiko bencana dan meminimalisir dampak yang ditimbulkannya.

6.2.1. Pemahaman Masyarakat terhadap Risiko Bencana

Kesiapsiagaan masyarakat dimulai dari pemahaman yang baik mengenai potensi risiko bencana di wilayah tempat tinggal mereka. Pendidikan dan penyuluhan mengenai jenis-jenis bencana, potensi dampaknya, dan cara-cara penyelamatan diri dapat meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan pengetahuan ini, masyarakat dapat mengambil tindakan yang tepat dalam situasi darurat, mengurangi korban jiwa, serta meminimalisir kerugian material.

Sebagai contoh, di daerah yang rawan gempa bumi, masyarakat harus memahami prosedur evakuasi, titik kumpul yang aman, dan persiapan menghadapi gempa seperti membuat rumah yang tahan gempa. Hal ini akan membuat masyarakat lebih siap ketika bencana benar-benar terjadi.

6.2.2. Partisipasi Aktif dalam Kegiatan Mitigasi Bencana

Partisipasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana, seperti latihan simulasi bencana, penyusunan rencana kontinjensi, dan pembentukan tim tanggap bencana di tingkat desa atau kelurahan sangat krusial. Ketika masyarakat ikut terlibat aktif, mereka tidak hanya lebih memahami prosedur yang harus dilakukan dalam menghadapi bencana, tetapi juga turut serta dalam merencanakan langkah-langkah pencegahan yang efektif.

Kesiapsiagaan ini juga melibatkan pengetahuan mengenai penggunaan teknologi, seperti aplikasi peringatan dini bencana yang dapat memberikan informasi secara real-time. Dengan mengakses informasi tersebut, masyarakat dapat melakukan evakuasi atau tindakan pencegahan sebelum bencana mencapai puncaknya.

6.2.3. Kekuatan Solidaritas dan Jaringan Sosial

Salah satu elemen penting dari kesiapsiagaan masyarakat adalah adanya solidaritas dan jaringan sosial yang kuat. Dalam situasi bencana, kemampuan masyarakat untuk saling membantu dan bekerja sama dapat meningkatkan ketahanan komunitas secara keseluruhan. Misalnya, dalam situasi darurat, masyarakat yang memiliki jaringan sosial yang kuat cenderung lebih mudah dalam menyalurkan bantuan, berbagi informasi, dan melakukan evakuasi bersama.

Di banyak daerah, pembentukan kelompok relawan lokal yang terdiri dari anggota masyarakat setempat juga menjadi bagian dari kesiapsiagaan. Mereka seringkali dilatih oleh pihak berwenang untuk bertindak sebagai ujung tombak dalam penanganan bencana di tingkat komunitas.

6.2.4. Peningkatan Kapasitas melalui Pelatihan dan Pendidikan

Pelatihan dan pendidikan merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Pelatihan tidak hanya terbatas pada keterampilan teknis dalam menangani bencana, tetapi juga mencakup aspek psikologis dalam menghadapi tekanan yang muncul saat bencana terjadi. Program-program pendidikan formal dan informal, seperti sekolah siaga bencana atau komunitas tangguh bencana, dapat meningkatkan kapasitas individu dan kelompok dalam merespons bencana.

Dalam hal ini, peran pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta sangat penting untuk mendukung program pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat. Bantuan dan fasilitas yang diberikan kepada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur tahan bencana dan alat-alat peringatan dini, juga dapat meningkatkan kesiapsiagaan.

6.2.5. Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait

Kesiapsiagaan masyarakat tidak dapat berjalan tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah dan lembaga terkait. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk membangun sistem peringatan dini, menyiapkan fasilitas evakuasi, serta menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, lembaga seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga berperan dalam memberikan pelatihan dan informasi terkait mitigasi bencana.

Kebijakan yang berpihak pada penguatan kesiapsiagaan masyarakat, seperti regulasi pembangunan di daerah rawan bencana atau pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan tanggap bencana, juga sangat diperlukan untuk menurunkan indeks risiko bencana secara signifikan.

Kesiapsiagaan masyarakat adalah kunci dalam menekan angka indeks risiko bencana. Dengan memahami risiko, berpartisipasi dalam mitigasi, menguatkan solidaritas, dan meningkatkan kapasitas melalui pendidikan serta dukungan pemerintah, masyarakat dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Upaya kolaboratif antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait menjadi landasan penting dalam menciptakan masyarakat yang tangguh terhadap

bencana, sehingga dapat melindungi nyawa dan aset yang berharga di tengah ancaman alam yang tak terelakkan.

Tabel 3. 24 Sasaran Strategis Indeks Kualitas Lingkungan Hidup & Indeks Risiko Bencana Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana	68.05	65.95	96,91%	Rp.13.253.375.750	Rp.11.852.966.973	89,43%	7,49%
		162,00	168,00	96,43%				

Dari hasil pengukuran yang dilakukan pada tabel di atas, diketahui pada sasaran strategis 6 (enam) tingkat efisiensi dari seluruh indikator kinerja sasaran adalah sebesar 7,49%. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian kinerja pada sasaran strategis 6 (enam) beserta alokasi anggarannya telah **efisien**.

Sasaran Ke 7 Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan

7. Indeks Infrastruktur

Pembangunan infrastruktur memberikan peranan yang sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mengurangi pengangguran, mengentaskan kemiskinan dan tentunya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itu Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir berkomitmen untuk terus meningkatkan pembangunan infrastruktur, dengan menetapkan alokasi anggaran yang cukup besar untuk pembangunan infrastruktur.

Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen *City Development Index* (CDI) yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar ini. Indeks infrastruktur didapatkan dengan cara menjumlahkan persentase rumah

tangga yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik dan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon . Semakin tinggi indeks infrastruktur yang dimiliki oleh sebuah kota maka dapat dikatakan tingkat pembangunan di kota tersebut semakin baik.

Indeks Infrastruktur Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2022 dan 2023 meperlihatkan kinerja yang terus meningkat. Untuk tahun 2022, indeks infrastrutur yang dicapai sebesar 58,00 dan meningkat sebanyak 1,24 poin pada **tahun 2023** menjadi sebesar **59,24**. Namun di tahun 2024 terjadi penurunan nilai menjadi 55,40, dari yang di targetkan pada RPD Indragiri Hilir 2024-2026 sebesar 63,33.

Tabel 3.25 Nilai Indeks Infrastruktur Tahun 2023 dan 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian (%)
			Realisasi	Target	Realisasi	
1	Indeks Infrastruktur	Indeks	59,24	63,33	55,40	87%

(sumber : Data Olahan Bagian Organisasi)

Tabel 3.26 Perhitungan Indeks Infrastruktur Tahun 2023 dan 2024

PERHITUNGAN INDEKS INFRASTRUKTUR									
NO	KOMPONEN PENGHITUNG INDEKS INFRASTRUKTUR	SATUAN	REALISASI 2022	NILAI		KOFFISIEN	NILAI INDEKS INFRASTRUKTUR		RUMUS INDEKS INFRASTRUKTUR (KALIAN KEMENKEU)
				2023	2024		2023	2024	
1	% jalan dalam kondisi baik	%	58	58,08	30,81	0,4122	23,12	12,70	$(0,4122 \times \text{jalan}) + (0,4149 \times \text{slr}) + (0,4620 \times \text{sanitasi}) + (0,4368 \times \text{plkn}) + (0,5037 \times \text{kom_irig})$
2	% keluarga dengan akses terhadap air minum layak tahun x	%	26,69	26,51	25,63	0,4149	11,00	10,62	
3	% keluarga dengan akses terhadap sanitasi layak tahun x	%	33	33	33	0,432	18,17	18,17	
4	% keluarga pengguna listrik PLN dan Non PLN	%	77,4	94,93	99,99	0,4368	41,47	43,68	
5	% keluarga yang memiliki akses terhadap sinyal telepon dan internet	%	94,07	80,05	80,08	0,5037	40,24	40,34	
							132,09	123,52	
TARGET INDEKS INFRASTRUKTUR							-	63,33	
NILAI INDEKS INFRASTRUKTUR :							59,24	55,40	

Penurunan tersebut dipengaruhi oleh kondisi jalan di kabupaten indragiri hilir yang mengalami penurunan kondisi. Pada tahun 2023 jalan dalam kondisi baik di kabupaten indragiri hilir berada pada angka 56,08 persen dari seluruh jumlah panjang jalan yang ada. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan yang signifikan menjadi 30,81 persen.

Panjang dan kualitas jalan Kabupaten berdasarkan Data Teknis Jalan (DD1) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 yang dirilis pada 31 Maret 2022 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

Tabel 3.27 Panjang dan Kondisi jalan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

Panjang (km)	Bahan Perkerasan (km)					Kondisi (km)		
	Hotmix	Aspal/ Penetrasi/ Makadam	Beton	Telford/ Kerikil	Tanah/ Belum Tembus	Baik	Sedang	Rusak
1.190,594	58,146	65,633	320,806	537,981	208,023	597,878	254,962	279,648

Sumber : Dinas PUTR Kab. Inhil

Kondisi Baik untuk jalan Kabupaten berdasarkan data diatas adalah sebanyak 50,22%, Kondisi Sedang 21,41 dan Kondisi Rusak sebanyak 23,49%. Sementara itu hasil rekapitulasi berdasarkan DD1 untuk kondisi mantap jalan sebesar 55,10% dan Kondisi Tidak Mantap Jalan sebesar 44,90%.

Berdasarkan data Teknik Jembatan Pada Ruas Jalan Kabupaten (DD2) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022 yang juga dirilis pada 31 Maret 2022 oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut.

Tabel 3.28 Panjang Jembatan di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

Jumlah Jembatan	680 unit
Panjang Jembatan	17.125,3 meter
NK 1	282 unit
NK 2	88 unit
NK 3	127 unit
NK 4	168 unit
NK 5	15 unit

Sumber : Dinas PUTR Kab. Inhil

Panjang jalan kabupaten indragiri hilir pada tahun 2023 adalah 1.190,594 Km, dengan jenis dan kondisinya bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.29 Panjang Dan Kondisi Jalan Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

Panjang (Km)	Bahan Perkerasan					Kondisi (Km)		
	Hotmix	Aspal/Penet rasi/Maqadam	Beton	Telford /kerikil	Tanah/belum Tembus	Baik	Sedang	Rusak
1.190,594	58,146	65,633	320.806	537,981	208,028	597,878	254,962	279,648

Sumber : Bappeda Inhil

Sedangkan jumlah dan kondisi jembatan yang ada di kabuapten Indragiri hilir pada tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.30 Jumlah, Panjang dan kondisi jembatan di kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023

Jumlah Jembatan	680 Unit
Panjang jembatan	17.125,3 meter
NK 1	282 unit
NK 2	88 unit
NK 3	127 unit
NK 4	168 unit
NK 5	15 unit

Sumber : Bappeda Inhil

Adapun capaian kinerja dari indikator persentase panjang jalan dalam kondisi baik dan persentase jalan dalam kondisi baik tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.31 Indikator Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Dan Persentase Jalan Dalam Kondisi Baik

No	Indikator Kinerja	2022		2023	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	Persentase jalan dalam kondisi baik	56	56	73,64	73
2	Persentase jembatan dalam kondisi baik	62,32	44,85	64,32	64
	Rata rata capaian		50,42		68,98

Sumber : LkjIP Dinas PU Kab. Inhil Tahun 2023

Sementara nilai indeks infrastruktur dari komponen persentase keluarga dengan sanitasi layak masih berada pada nilai 35% di Tahun 2022, 2023 dan 2024.

Sanitasi merupakan pertumbuhan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia. Sanitasi termasuk di dalamnya beberapa prasarana antara lain sistem pengelolaan air limbah (termasuk instalasi pengolahan air limbah), sistem pengelolaan sampah, sistem drainase atau disebut pengolahan limpahan air hujan. Akses sanitasi layak merupakan salah satu fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan bagi seluruh masyarakat ataupun rumah tangga, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air limbah (SPAL)/ SistemTerpusat. Akan tetapi akses sanitasi layak tidak akan terwujud sesuai standar kesehatan apabila drainase belum tertata dengan rapi.

Jika ditinjau dari sudut kesehatan, pembuangan kotoran manusia yang tidak memenuhi standar sanitasi akan mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Berdasarkan data Susenas, sekitar 71,01 persen rumah tangga menggunakan jenis kloset leher angsa dan sebanyak 63,81 persen yang memiliki jarak sumber air minum dengan penampungan tinja terbanyak berjarak >10 m.

Tabel 3.32 Persentase Fasilitas Tempat Buang Air di Kabupaten Indragiri Hilir

Karakteristik	Fasilitas Tempat Buang Air Besar		Jumlah
	Sendiri	Lainnya	
Kelompok Pengeluaran			
40% Terbawah	74,83	25,17	100
40% Tengah	86,93	13,07	100
20% Teratas	90,58	9,42	100
Indragiri Hilir	83,82	16,18	100

Adapun berdasarkan tempat pembuangan akhir tinja, hanya 39,81% rumah tangga yang telah memiliki fasilitas pembuangan tinja seperti tangki septik, IPAL, atau SPAL. Sedangkan terdapat 60,19% sisanya adalah masyarakat yang tidak memiliki fasilitas tersebut.

Tabel 3.33 Persentase Tempat Pembuangan Akhir Tinja di Kabupaten Indragiri Hilir

Karakteristik	Tempat Pembuangan Akhir Tinja		Jumlah
	Tangki Septik/IPAL/SPAL	Lainnya	
Kelompok Pengeluaran			
40% Terbawah	36,86	63,14	100
40% Tengah	35,31	64,69	100
20% Teratas	49,95	50,05	100
Indragiri Hilir	39,81	60,19	100

Melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupten Indragiri Hilir pada tahun 2023 telah melakukan berbagai macam strategi dalam penataan sanitasi yang layak bagi setiap rumah tangga diantaranya menciptakan permintaan sanitasi dan perubahan prilaku kebersihan untuk meningkatkan kesadaran dan prioritas untuk memiliki fasilitas sanitasi yang layak

dengan menjelaskan resiko kesehatan yang akan dihadapi masyarakat akibat dari buruknya sanitasi. Berdasarkan penelitian fromatif, penciptaan permintaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah akan menggunakan strategi komukisai massal, komunikasi interpersonal/kelompok dengan sasaran rumah tangga, bisnis, lembaga dan sekolah dilingkungan perkotaan dan permukiman.

Panjang jalan dan jembatan serta infrastruktur perhubungan masih perlu ditingkatkan kualitasnya. Selain itu sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi,serta perumahan perlu penangannan yang lebih baik lagi. hal ini dalam rangka mengakomodir penyediaan pelayanan infrastruktur jalan dan jembatan,serta infrastruktur dasar lainnya di Kabupaten Indragiri Hilir.Selain itu juga perlu adanya penanganan terhadap Limbah dan Drainase yang mengakibatkan terjadinya genangan apabila hujan deras dan Pasang naik terutama didaerah perkotaan.Adapaun hambatan dalam pembangunan infrastruktur di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan aspek pengembangan ekonomi lokal yaitu keterbatasan pengelolaan sumberdaya lokal dan belum terintegrasinya dengan kawasan pusat pertumbuhan.
2. Permasalahan aspek sarana dan prasarana terutama transportasi darat, laut dan; telekomunikasi, serta infrastruktur ke wilayah-wilayah terpencil serta akses dan sarana prasarana pariwisata.
3. Permasalahan aspek karakteristik daerah terutama berkaitan dengan daerah pesisir (banjir, longsor, kebakaran hutan dan lahan, abrasi, erosi, interusi) serta rawan konflik sosial.
4. Adanya konflik Lahan perkebunan kelapa dalam (perkebunan rakyat) dan lahan pemukiman yang masih masuk kawasan hutan.
5. Kebijakan tata ruang yang belum ditetapkan
6. Terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan antar wilayah
7. Belum berkembangnya wilayah-wilayah cepat tumbuh. Hal ini disebabkan antara lain:
 - a. Keterbatasan informasi pasar dan teknologi untuk pengembangan produk unggulan;

- b. Kurangnya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari pelaku pengembangan kawasan di daerah;
- c. Kurangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengelolaan pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian daerah;
- d. Lemahnya koordinasi, sinergi, dan kerjasama diantara pelaku-pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta, lembaga nonpemerintah, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan daya saing produk unggulan;
- e. Masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerjasama investasi;
- f. Keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik dan ekonomi dalam mendukung pengembangan kawasan dan produk unggulan daerah; serta
- g. Belum optimalnya pemanfaatan kerangka kerjasama antar wilayah maupun antar negara untuk mendukung peningkatan daya saing kawasan dan produk unggulan.

Tabel 3. 74 Sasaran Strategis Indeks Infrastruktur Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan	63,33	55,40	87,48%	Rp.238.660.405.702	Rp.189.868.864.225	79,56%	9,06%

Dari hasil pengukuran yang dilakukan pada tabel di atas, diketahui pada sasaran strategis 7 (tujuh) tingkat efisiensi dari seluruh indikator kinerja sasaran adalah sebesar 9,06%. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian kinerja pada sasaran strategis 7 (tujuh) beserta alokasi anggarannya telah **efisien**.

Sasaran Ke 8 Meningkatnya Profesionalitas ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

8.1 Indikator Nilai AKIP

Evaluasi implementasi SAKIP dilaksanakan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Tabel 3. 35 Kategori Penilaian SAKIP

Kategori	Range-Nilai	Keterangan
AA	90-100	Sangat Memuaskan
A	80-90	Memuaskan
BB	70-80	Sangat Baik
B	60-70	Baik
CC	50-60	Cukup
C	30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Sumber : KemenpanRB 2017

Pencapaian Indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir diperoleh sebagai berikut:

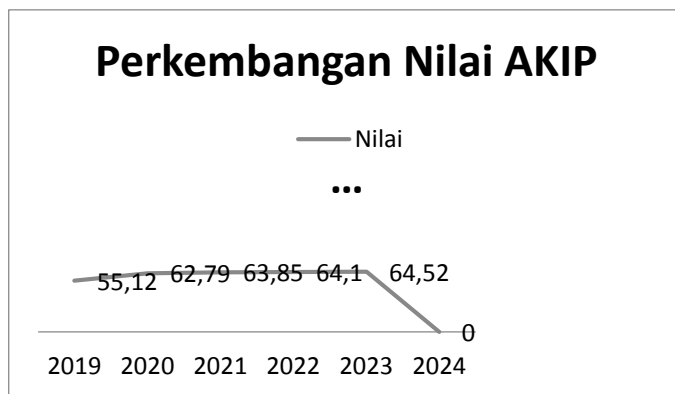
Tabel 3. 36 Indikator Kinerja Nilai AKIP Tahun 2023-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian (%)	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Nilai AKIP	Nilai	BB (70)	B (64,52)	93,00%	68,01	65,15	94.00%

Sumber LHE KemenpanRB B/124/AA.05/2024 tanggal 9 September 2024

Target kinerja sasaran kapasitas tata kelola pemerintah dengan indikator Nilai AKIP melalui RKPD target Nilai AKIP dan dalam Perjanjian Kinerja 2024 target Nilai AKIP ditetapkan 68,05 (B). Capaian kinerja tahun 2024 dari capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yaitu 65,15 (B) dari target B (68,15) sehingga capaian kinerjanya sebesar 94,% masuk kategori Baik. Nilai AKIP tahun 2024 menunjukkan peningkatan nilai sebesar 0,63 % yaitu dari 64,52 di tahun 2023 menjadi 65,15 di tahun 2024. Untuk perkembangan nilai AKIP dari tahun 2019-2024 dapat dilihat dari grafik berikut berikut ini:

Gambar 3. 1 Perkembangan Nilai AKIP Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2024



2

Dari grafik Perkembangan Nilai SAKIP dari Tahun 2019 sd Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terus Mengalami kenaikan nilai Akuntabilitas kinerja dimana tahun 2019 Nilai AKIP memperoleh 55, 12 Pada tahun 2020 menjadi 62,79 mengalami kenaikan 7, 67 Poin Pada Tahun 2021 nilai AKIP 63,85 mengalami kenaikan 1,06 Poin sedangkan 2022 memperoleh 64.1 dengan kenaikan 0.16 Poin.

8.1.1 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan Realisasi capaian atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2023 dan 2024 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat dilihat dari Tabel berikut:

Tabel 3. 37 Komponen Dan Pembobotan Nilai Evaluasi SAKIP

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
			2023	2024
a.	Perencanaan Kinerja	30	22,51	22,54
b.	Pengukuran kinerja	30	18,64	18,83
c.	Pelaporan Kinerja	15	9,96	10,01
d.	Evaluasi Internal	25	13,41	13,77
Nilai Hasil Evaluasi		100	64,10	65,15
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menunjukkan bahwa nilai sebesar 65,15 dengan predikat "B". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Baik", yaitu implementasi AKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja

Nilai AKIP pada tahun 2024 mengalami peningkatan 0,63 %. Hal ini menunjukkan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah berupaya mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang lebih baik melalui perbaikan yang berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya komponen Perencanaan, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Internal.

Tabel 3. 38 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahunan Dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
1	Nilai AKIP	Nilai	2020	B	62,79	100 %
			2021	B	63,85	100 %
			2022	B	64,10	100 %
			2023	70 (BB)	64,52	93 %
			2024	68,01	65, 15	94 %

8.1.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menindaklanjuti Rekomendasi dari Kemen PANRB sebagai berikut :

1. Membangun Aplikasi Manajemen Kinerja Melalui Aplikasi E Sakip Smart Inhil Meningkatkan Wawasan /Pengetahuan Kepada Pejabat Yang Menanganai Sakip Terkait Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
2. Memberikan Reward Penghargaan Kepada Perangkat Daerah yang Memperoleh Nilai SAKIP Sangat Baik



Analisis Peningkatan Nilai AKIP Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten

Indragiri Hilir Tahun 2024 Yang Dilaksanakan Oleh Kementerian PAN RB RI Terdapat Beberapa Catatan Di Antaranya Sebagai Berikut:

1. Belum Memiliki Pedoman Pengumpulan Dan Pengukuran Data Kinerja Yang Lengkap Termasuk Mekanisme Pemanfaatan Aplikasi Pengukuran Kinerja;
2. Aplikasi E-Sakip Belum Dimanfaatkan Dengan Baik;
3. Pengukuran Kinerja Organisasi Belum Diikuti Dengan Proses Pembaruan Target Dan Strategi Dalam Upaya Memastikan Pencapaian Kinerja Maksimal di Akhir Periode
4. Belum memiliki pedoman perencanaan yang komprehensif dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan perencanaan daerah;
5. Penjenjangan/cascading kinerja belum sepenuhnya mempertimbangkan *logical framework* dan *Critical Success Factor* (CSF) atas pencapaian kinerja sehingga belum menggambarkan hubungan sebab akibat dan pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang dihadapi;



8.1.3 Solusi yang telah dilakukan

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menindaklanjuti Rekomendasi hasil evaluasi tahun 2022 sehingga telah terjadi peningkatan peningkatkan akuntabilitas kinerja. Walaupun namun masih perlu disempurnakan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan suatu masukan terkait perbaikan lebih lanjut atas capaian evaluasi kinerja tersebut. Adapun hasil penilaian kinerja AKIP tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 3. 39 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Tahun 2023

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan setiap PD dengan memastikan bahwa tujuan dan sasaran strategis yang dikawal oleh setiap perangkat daerah telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (result oriented) dan memiliki kualitas indikator kinerja yang memenuhi kriteria yang SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound) dan memenuhi unsur cukup dalam mengawal kinerja;	Pembinaan Penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026 

		
2	Melakukan reviu dan perbaikan dokumen cascading kinerja baik di level Pemerintah Daerah maupun PD untuk memastikan kualitas cascading (penjenjangan) kinerja dari level tertinggi hingga terendah dapat berorientasi outcome (hasil) sesuai dengan levelnya dengan memerhatikan logical framework dan critical success factor dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi sehingga program dan kegiatan yang disusun dapat efektif dan efisien dalam menyelesaikan isu strategis daerah. Proses reviu dan perbaikan tersebut agar berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;	Integrasi Penjabaran Kinerja melalui Cascading kedalam dokumen Perencanaan Daerah (RPD Tahun 2024-2026) 

3	Memanfaatkan hasil perbaikan cascading kinerja untuk memilah program dan kegiatan apa saja yang tidak relevan dengan sasaran strategis yang ingin dicapai dan berpotensi menimbulkan inefisiensi dan inefektivitas dalam mencapai kinerja organisasi	Penjabaran Cascading Kinerja sampai level Program 
4	Mengoptimalkan aplikasi e-sakip sebagai alat untuk monitoring pencapaian kinerja Bupati dan setiap perangkat daerah sekaligus dapat diintegrasikan dengan sistem manajemen kinerja lainnya;	 Mengembangkan dan Membangun Aplikasi E SAKIP SMART yang berdampak/terintegrasi ke Perangkat Daerah
5	Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai pertimbangan dalam penentuan strategi, target kinerja kedepan, pola pengembangan kompetensi dan mutasi rotasi pada ASN strategis yang harus diselesaikan	SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) disesuaikan dengan Cascading

6	Menginformasikan Laporan Kinerja baik dari level pemerintah daerah maupun PD dalam website kabupaten sebagai bagian dari transparansi atas pelaporan kinerja kepada publik;	Publikasi LKJIP Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Website Resmi Pemerintah Daerah Melaksanakan SAKIP Award di lingkup Kabupaten Indragiri Hilir sebagai upaya untuk mendorong percepatan implementasi SAKIP di seluruh Perangkat Daerah 
---	---	---

8.2 Indeks Profesional ASN

Indeks profesionalitas ASN (IP-ASN) adalah indikator kinerja daerah pada sasaran meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintah di daerah yang merupakan tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas Aparatur Sipil Negara berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.

Pengukuran indeks profesionalitas ASN dilaksanakan dengan menggunakan metode perhitungan yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara serta peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi :

a. Kualifikasi (Bobot 25%)

Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi :

- Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);

- Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
- Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
- Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga);
- Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-1 (Diploma-Satu)/ SLTA Sederajat; dan
- Pendidikan di bawah SLTA

b. Kompetensi (Bobot 40%)

Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi:

- Diklat Kepemimpinan;
- Diklat Fungsional;
- Diklat Teknis; dan
- Seminar/Workshop/Konferensi/Setara.

c. Kinerja (Bobot 30%)

Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi :

- Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- Perilaku kerja.

d. Disiplin (Bobot 5%)

Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami yang meliputi :

- Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan
- Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat)

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN dilakukan pengkategorian tingkat profesionalitas sebagai berikut:

Tabel 3.40 Tingkat Nilai Profesionalitas ASN

Nilai	Tingkat Profesional ASN
91-100	Sangat Tinggi
81-90	Tinggi
71-80	Sedang
61-70	Rendah
≤60	≤60 Sangat Rendah

Sumber data : Buku Saku Indeks Profesionalitas ASN

Capaian kinerja pada Indikator Indeks Profesional ASN

Tabel 3. 41 Capaian Kinerja Indeks Profesional ASN Tahun 2023-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian (%)	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	IP ASN	Nilai	58	(64,31)	111,00%	58,10	73.95	127,%
Sumber : Badan Kepegawaian Negara Regional XII tanggal 23 Oktober 2024 Nomor : 00717/B-BJ.03.02/SD/KR.XII/2024								

Berdasarkan tabel 8.2 bahwa capaian kinerja sasaran strategis Meningkatnya Indeks Profesional Aparatur Sipil Daerah di daerah pada Tahun 2024 dengan indikator keberhasilan adalah Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) sudah mencapai target yang diharapkan, yaitu sebesar 73,95 % Kategori sedang dengan capaian 127 % . Target Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 adalah sebesar 58 dengan Realisasi 64,31 pada capaian 111 % terjadi kenaikan poin sebesar 16 % berdasarkan hasil dari Badan Kepegawaian Negara 0717/B-BJ.03.02/SD/KR.XII/2024.

Gambar 3. 5 Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023

No	Nama Instansi	Jumlah ASN	Kualifikasi (25)	Kompetensi (40)	Kinerja (30)	Disiplin (5)	Rata Nilai (100)	Kategori
1	Pemerintah Kota Padang Panjang	1.822	21,59	33,30	25,03	5,00	84,92	tinggi
2	Pemerintah Kab. Tanah Datar	4.566	20,75	33,71	25,16	5,00	84,62	tinggi
3	Pemerintah Kab. Sijunjung	3.399	20,95	32,15	25,55	5,00	83,65	tinggi
4	Pemerintah Kab. Dharmasraya	3.188	20,95	31,65	25,17	5,00	82,77	tinggi
5	Pemerintah Kota Batam	6.996	22,20	30,49	24,99	4,99	82,69	tinggi
6	Pemerintah Kota Solok	1.942	22,21	29,71	24,89	5,00	81,81	tinggi
7	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	16.670	21,63	29,29	24,88	5,00	80,81	sedang
8	Pemerintah Kab. Indragiri Hulu	5.078	20,95	28,31	26,37	5,00	80,64	sedang
9	Pemerintah Kota Bukittinggi	2.279	21,69	28,69	25,22	5,00	80,60	sedang
10	Pemerintah Kota Dumai	4.172	21,76	27,49	25,39	5,00	79,65	sedang
11	Pemerintah Kab. Pesisir Selatan	5.802	20,88	28,56	24,82	5,00	79,26	sedang
12	Pemerintah Kab. Natuna	3.011	21,21	27,89	24,93	5,00	79,02	sedang
13	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	5.544	22,24	26,92	24,66	4,99	78,81	sedang
14	Pemerintah Kota Pariaman	2.471	21,72	27,28	24,65	5,00	78,65	sedang
15	Pemerintah Kab. Pasaman Barat	4.991	21,37	27,11	25,08	5,00	78,55	sedang
16	Pemerintah Kab. Agam	5.696	20,89	27,36	25,20	5,00	78,43	sedang
17	Pemerintah Kab. Solok Selatan	3.423	21,35	26,80	25,13	5,00	78,28	sedang
18	Pemerintah Kota Payakumbuh	2.638	21,46	26,58	25,17	5,00	78,22	sedang
19	Pemerintah Kota Padang	7.678	21,36	26,71	25,15	5,00	78,21	sedang
20	Pemerintah Kab. Pasaman	3.640	20,82	27,77	24,59	5,00	78,17	sedang
21	Pemerintah Provinsi Riau	13.924	21,98	25,90	25,06	5,00	77,95	sedang
22	Pemerintah Kota Pekanbaru	6.512	21,53	26,04	24,97	5,00	77,53	sedang
23	Pemerintah Kota Tanjungpinang	3.099	21,57	25,97	24,96	5,00	77,50	sedang
24	Pemerintah Kota Sawahlunto	1.983	21,47	25,91	24,98	5,00	77,36	sedang
25	Pemerintah Kab. Limapuluh Kota	6.046	20,66	27,01	24,62	5,00	77,29	sedang
26	Pemerintah Kab. Pelalawan	4.304	20,97	26,65	24,55	5,00	77,19	sedang
27	Pemerintah Kab. Solok	4.931	20,76	27,13	24,24	5,00	77,13	sedang
28	Pemerintah Kab. Lingga	2.771	21,11	26,07	24,78	5,00	76,96	sedang
29	Pemerintah Kab. Kampar	7.006	20,57	26,91	24,40	5,00	76,87	sedang
30	Pemerintah Kab. Bengkalis	6.731	21,39	25,46	24,58	5,00	76,44	sedang
31	Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas	1.893	21,54	24,74	25,15	5,00	76,44	sedang
32	Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti	2.926	21,29	25,12	24,75	5,00	76,17	sedang
33	Pemerintah Kab. Karimun	4.033	21,09	25,01	24,91	5,00	76,02	sedang
34	Pemerintah Kab. Padang Pariaman	5.380	20,83	26,14	23,82	5,00	75,81	sedang
35	Pemerintah Kab. Bintan	3.401	21,22	24,66	24,81	5,00	75,68	sedang
36	Pemerintah Kab. Kuantan Singingi	5.350	21,01	25,48	23,68	5,00	75,18	sedang
37	Pemerintah Kab. Rokan Hilir	6.681	21,47	24,57	23,86	5,00	74,90	sedang
38	Pemerintah Kab. Siak	5.918	21,62	24,23	23,69	5,00	74,54	sedang
39	Pemerintah Kab. Rokan Hulu	5.301	20,82	25,13	23,32	5,00	74,27	sedang
40	Pemerintah Kab. Indragiri Hilir	6.480	20,85	25,19	22,93	5,00	73,95	sedang
41	Pemerintah Kab. Kep. Mentawai	2.583	21,37	21,96	21,63	5,00	69,97	rendah

8.2.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan

8.2.1.1 Faktor-faktor Keberhasilan Capaian Kinerja

Beberapa hal yang menjadi keberhasilan capaian kinerja pada sasaran yaitu sebagai berikut :

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan kerjasama dengan Badan Pengembangan SDM Provinsi Riau dalam pelaksanaan diklat, dengan tujuan meningkatkan pengembangan kompetensi ASN di lingkungan Kabupaten Indragiri Hilir
2. Terselenggaranya diklat pada setiap jenjang jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Administrator / Pengawas/ Fungsional dalam rangka peningkatan kompetensi ASN.
3. Tersedianya dokumen analisis jabatan yang telah dibuat dalam rangka menunjang pemetaan kebutuhan ASN pada setiap perangkat daerah serta membantu pemerataan beban kinerja dalam rangka peningkatan kinerja perangkat daerah.

8.2.1.2 Faktor-faktor Penghambat capaian Kinerja

Belum maksimalnya Indeks Profesionalitas ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dikarenakan masih banyak PNS di Lingkungan Perangkat Daerah belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan. Baik itu Pendidikan dan Pelatihan yang bersifat Klasikal maupun Pendidikan dan Pelatihan yang bersifat Non Klasikal dikarenakan keterbatasan anggaran untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dalam rangka pengembangan Kompetensi.

8.2.1.3 Solusi yang diharapkan untuk peningkatan Indeks Profesional ASN

Pemerintah Kabup[aten Indragiri Hilir Adalah :

- a. Menyusun informasi dasar mengenai kesenjangan kualifikasi dan Kompetensi.
- b. Menyusun Strategi dan Program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN baik melalui pendidikan dan pelatihan maupun melalui sosialisasi, Seminar, Bimbingan Teknis, Kursus, Praktik Kerja/Benchmark, Mentoring, Coaching, Councelling ataupun Pertukaran Pegawai.
- c. Meningkatkan Anggaran dalam rangka pengembangan Kapasitas dan Kompetensi SDM Apratur.

- d. ASN berperan aktif dalam untuk melakukan update mandiri data pengembangan kompetensinya di aplikasi myasn
- e. Implementasi Penggunaan Media Informatika ASN terhadap tatacara menggunakan aplikasi dan kendala jaringan di daerah2 yang akses internetnya masih terbatas.
- f. Sosialisasi yang dilakukan BKPSDM Kabupaten Indragiri Hilir kepada perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten indragiri hilir untuk melakukan update data mandiri di aplikasi my asn untuk mendongkrak nilai ip asn pemkab inhil secara keseluruhan.

Tabel 3. 42 Sasaran Strategis Nilai AKIP & Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Profesionalitas ASN Dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	68,01	65,15	95,79%	Rp.58.434.975.843	Rp.45.610.372.907	78,05%	20% (30,07%)
		58,10	74,04	127,44%				

Dari hasil pengukuran yang dilakukan pada tabel di atas, diketahui pada sasaran strategis 8 (delapan) tingkat efisiensi dari seluruh indikator kinerja sasaran adalah sebesar 20%. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian kinerja pada sasaran strategis 8 (delapan) beserta alokasi anggarannya telah **efisien**.

Sasaran Ke 9 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah

9.1 Indeks Integritas

Indeks Integritas merupakan angka yang menunjukkan tingkat integritas suatu instansi, yang didapatkan dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI). SPI adalah survei yang dilakukan untuk mengukur risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi. Survei Penilaian Integritas adalah ukuran (angka) yang menunjukkan level integritas instansi yang merupakan indeks komposit dari tiga dimensi utama, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, dan penilaian ekspert/ahli; dikurangi dengan faktor koreksi prevalensi korupsi dan integritas

pelaksanaan SPI. Survei Penilaian Integritas (SPI) merupakan survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD).

Tujuan pengukuran indeks integritas adalah mendefinisikan integritas organisasi publik, mengidentifikasi faktor-faktor integritas dan keterkaitannya dan menciptakan alat ukur kinerja organisasi yang objektif dan dapat diandalkan.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), indikator Indeks Integritas didefinisikan secara operasional sebagai Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tabel 3. 43 Capaian Kinerja Indeks Integritas Tahun 2023-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian	Tahun 2024		Capaian
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1.	Indeks Integritas	Nilai	N/A	N/A	N/A	81,71	86,44	105,79 %

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian untuk indeks integritas tahun 2024 adalah sebesar 105,79% dengan target senilai 81,71 dan realisasi senilai 86,44 untuk tahun 2024. Sementara, pada tahun 2023 target dan realisasi tidak diketahui dikarenakan indikator Indeks Integritas bukan merupakan indikator dalam dokumen pembangunan daerah jangka menengah berupa RPJMD Tahun 2018-2023. Sehingga, nilai atau persentase capaian untuk indikator kinerja berupa Indeks Integritas tidak dapat dihitung atau tidak diketahui.

Secara umum, Indeks Integritas yang direpresentasikan oleh Survei Penilaian Integritas (SPI) Eksternal telah memenuhi target tahunan 2024. Unit kerja/organisasi dapat melakukan berbagai upaya pencegahan korupsi, baik dengan melakukan internalisasi budaya antikorupsi melalui berbagai mekanisme sosialisasi/kampanye hingga membangun sistem antikorupsi yang baik dan memudahkan pengguna layanan/penerima manfaat pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja/organisasi untuk ikut serta mengambil peran secara aktif. Dengan capaian yang melebihi target, maka

salah satu kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah banyak melakukan upaya perbaikan untuk mencegah korupsi.

9.2 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) adalah suatu indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah, dimana untuk mengukur Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) menggunakan data tahun anggaran sebelumnya dengan tahun ukur saat ini, artinya untuk nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2024 menggunakan data Tahun Anggaran 2023 dengan Tahun Ukur 2024.

Tabel 3.44 Capaian Indek Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2023-2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023			Target 2024		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase	N/A	69,45	N/A	82,28%	62,05	75,41 %

Sumber : DataHasil Penilaian BPP Kementerian Dalam Negeri Tahunl 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir menargetkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebesar 82,28 %, bila melihat realisasi hasil penilaian Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Tahun 2024 sebesar 62,05%, maka tingkat capaian kinerja sebesar 75,41%.

Realisasi Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 sebesar 62,05%, sedangkan realisasi Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2023 sebesar 69,45% , maka dapat dilihat realisasi kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 10,66% bila dibandingkan dengan tahun 2023. Perbandingan capaian kinerja Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Kabupaten Indragiri Hilir antara tahun 2023 dan tahun 2024 tidak dapat dilakukan (*non available*) dikarenakan tidak tersedianya data target Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2023.

Bila mengacu pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026, pada tahun 2025 dan 2026 Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah menargetkan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 84,55 % dan 86,83%. Bila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 82,28%, maka Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menargetkan peningkatan nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) sebesar 2,27% pada tahun 2025 dan 2,28% pada tahun 2026.

Masih rendahnya ketercapaian kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dapat disebabkan beberapa hal, antara lain :

1. Kesulitan memenuhi minimal 40% Alokasi Belanja Infrastruktur dari APBD;
2. Tidak semua jenis Indikator Alokasi Belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) teranggarkan dalam APBD;
3. Adanya ketidaksesuaian program antara RKPD dan KUA PPAS, kemungkinan disebabkan *bug* pada Sistem, sebab realnya tidak ada perbedaan antara program pada RKPD dan KUA PPAS. Data di upload melalui menu integrasi antara IPKD dan SIPD;
4. Adanya ketidaksesuaian pagu antara KUA PPAS dan APBD, dikarenakan adanya penyesuaian - penyesuaian belanja setelah rapat pembahasan RAPBD dengan DPRD; dan
5. pada penilaian Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah, ketepatan waktu penguploadan dokumen ke *website* Pemerintah Daerah dikarenakan rentang batas waktu upload setelah dokumen ditetapkan cukup singkat.

Beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam meningkatkan penilaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dengan melakukan kegiatan/program kegiatan antara lain:

1. Agar pemerintah daerah mengupayakan pemenuhan anggaran infrastruktur dalam penyusunan APBD minimal 40 persen;
2. Mengidentifikasi kembali terhadap indikator alokasi belanja yang termasuk dalam pemenuhan SPM;
3. Melakukan koordinasi ke Pusdatin berkenaan perbedaan data antara RKPD dan KUA PPAS; dan

4. Mengupayakan melakukan penguplodan data secara tepat waktuMeningkatkan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran: Pastikan bahwa perencanaan dan penganggaran dilakukan secara matang dan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Tabel 3. 45 Sasaran Strategis Indeks Integritas & Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	81,71	86,94	106,40%	Rp.345.795.931.669	Rp.274.730.245.612	79,45%	12,60%
		82,28	62,05	75,41%				

Dari hasil pengukuran yang dilakukan pada tabel di atas, diketahui pada sasaran strategis 9 (sembilan) tingkat efisiensi dari seluruh indikator kinerja sasaran adalah sebesar 12,60%. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian kinerja pada sasaran strategis 9 (sembilan) beserta alokasi anggarannya telah **efisien**.

Sasaran Ke 10 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

10. Indeks Persepsi Pelayanan Publik

Pelayanan publik menjadi suatu tolok ukur kinerja Pemerintah yang paling kasat mata. Masyarakat dapat langsung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kualitas layanan publik yang diterima, karena kualitas layanan publik dirasakan masyarakat dari semua kalangan, dimana keberhasilan dalam membangun kinerja pelayanan publik secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel akan mengangkat citra positif Pemerintah baik pusat maupun daerah dimata masyarakat.

Salah satu upaya meningkat kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah kabupaten indragiri hilir melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya melalui survei Kepuasan Masyarakat, dengna melakukan pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggara

pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhan yang diharapkan.

Ada 9 unsur pelayanan yang diukur dalam pelaksanaan Survei kepuasan Masyarakat yaitu :

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
3. Waktu Penyelesaian
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan sebagai berikut :

Tabel 3. 46 Nilai Persepsi IKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	KURANG BAIK
3	3,0644 – 3,533	76,61 – 88,30	B	BAIK
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	SANGAT BAIK

Tabel 3. 47 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2022 dan 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022	Tahun 2023		Capaian (%)
			Realisasi	Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84.31	89.22	84.14	95%

(sumber : Data Olahan Bagian Organisasi)

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Tahun 2023 adalah sebesar 84,14 sedangkan pada Tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir mendapat nilai sebesar 86,69, terjadi peningkatan nilai IKM dari Tahun sebelumnya.

Tabel 3. 48 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2023 dan 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023	Tahun 2024		Capaian (%)
			Realisasi	Target	Realisasi	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	84.14	89.64	86,69	97%

(sumber : Data Olahan Bagian Organisasi)

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 23 UPP telah menyampaikan laporannya. Dari data di atas dapat dilihat, bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten pada Tahun 2024 dengan realisasi sebesar 86,69 terdapat kenaikan nilai sebesar 2,55 dari realisasi tahun 2023, dengan klasifikasi Mutu Pelayanan B dengan kategori Kinerja Unit Layanan BAIK. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kijerja Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024 yaitu sebesar 89.64 dengan demikian capaian kinerja untuk Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 97%.

Pelaksanaan pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada Semester II, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Baik dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat rata-rata yaitu 86,69. Terjadi peningkatan dalam kinerja penyelenggaraan pelayanan publik jika dibandingkan pada nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Semester I yaitu 84,77 ada kenaikan nilai sebesar 1,92.

10.1 Analisis Keberhasilan/Kegagalan

Berdasarkan hasil rekapitulasi laporan SKM yang sudah dilakukan, sebanyak 23 UPP telah menyampaikan laporannya. Masih terdapat UPP yang belum dapat menyampaikan laporan SKM pada tahun ini.

Adapun upaya dilakukan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya :

1. Membuat rencana tindak lanjut terhadap unsur layanan yang menjadi prioritas perbaikan.
2. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik pada Unit Pelayanan Publik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terutama pada Unit Pelayanan Publik yang menjadi Lokus Penilaian baik dari KemenPAN RB maupun OMBUDSMAN RI.

3. Menciptakan beberapa inovasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan terutama yang berhubungan dengan pelayanan langsung masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir. Dengan sumberdaya yang tersedia, pelayanan masyarakat tetap menjadi fokus utama dalam pemerintahan.
4. Dimulainya proses pembangunan Mall Pelayanan Publik pada tahun 2024.
5. Penerapan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. baik dari sisi pengaduan pelayanan publik dan perijinan.

Tabel 3. 49 Sasaran Strategis Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	89.64	86.69	96,71%	Rp.32.246.266.109	Rp.28.048.022.614	86,98%	10,06%

Dari hasil pengukuran yang dilakukan pada tabel di atas, diketahui pada sasaran strategis 10 (sepuluh) tingkat efisiensi dari seluruh indikator kinerja sasaran adalah sebesar 10,06%. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian kinerja pada sasaran strategis 10 (sepuluh) beserta alokasi anggarannya telah **efisien**.

Sasaran Ke 11 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Statistik Sektor

11. Indeks Pembangunan Statistik

Statistik memiliki arti penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan nasional. Kegiatan statistik dituntut untuk menghasilkan statistik yang berkualitas, cepat, dan beragam sesuai kebutuhan pengguna. Oleh karena itu, diperlukan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik pada instansi pemerintah.

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan statistik sektoral. IPS juga digunakan untuk mengukur capaian penyelenggaraan SDI dan data statistik sektoral di berbagai instansi

Tujuan IPS ini adalah untuk mengukur capaian penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan untuk terpenuhinya prasyarat penyelenggaraan SDI. IPS juga

bisa dijadikan dasar melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan SDI, juga sebagai dasar BPS menyusun strategi pembinaan statistik sektoral.

Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Disamping itu, IPS juga dapat menjadi ukuran dalam pencapaian pelaksanaan Satu Data Indonesia dan penyelenggaraan urusan statistik di tingkat pemerintahan daerah.

EPSS dilaksanakan pada seluruh instansi pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang menyelenggarakan kegiatan statistik sektoral. Penilaian EPSS dilakukan melalui berbagai tahapan, mencakup tahapan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu, serta penilaian visitasi jika diperlukan. EPSS mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral pada instansi pemerintah yang terdiri atas 5 (lima) tingkat kematangan sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.47.

Tabel 3. 50 Tingkat Kematangan Dan Kriteria Dalam EPSS

Tingkat Kematangan (1)	Kriteria (2)
Level 1 Rintisan	Proses penyelenggaraan statistik sektoral belum dilakukan oleh seluruh unit kerja.
Level 2 Terkelola	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan oleh seluruh unit kerja, namun masih menggunakan standar yang hanya berlaku di unit kerja itu sendiri.
Level 3 Terdefinisi	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah diharmonisasi dan kemudian ditetapkan sebuah standar/pedoman oleh unit yang melaksanakan fungsi manajemen dan berlaku untuk seluruh unit kerja dalam organisasi.
Level 4 Terpadu dan Terukur	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan secara terpadu dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi. Kinerja penyelenggaraan statistik sektoral dapat diukur melalui kegiatan reviu dan evaluasi pada setiap proses.
Level 5 Optimun	Proses penyelenggaraan statistik sektoral telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil rivi dan evaluasi.

EPSS menghasilkan indeks pembangunan statistik dengan prediket yang disajikan dalam tabel 3.47.

Tabel 3. 51 Predikat Indeks Hasil EPSS

Nilai (1)	Predikat (2)
4,2 - 5,0	Memuaskan
3,5 - <4,2	Sangat baik
2,6 - <3,5	Baik
1,8 - <2,6	Cukup
< 1,8	Kurang

11.1 Indeks Pembangunan Statistik Nasional

Tabel 3. 52 Nilai Indeks Hasil EPSS 2024 Menurut Domain Dan Jenis Instansi Pemerintah

Indeks (1)	Nasional (2)	Jenis Instansi Pemerintah					
		Kementrian (3)	LPNK (4)	Instansi Lain (5)	Pemprov (6)	Pemkab (7)	Pemkota (8)
IPS	2,35	2,78	2,81	2,25	2,55	2,25	2,51
Domain prinsip SDI	2,43	2,96	2,97	2,21	2,68	2,31	2,64
Domain Kualiat as Data	2,27	2,71	2,76	2,23	2,36	2,17	2,41
Domain Proses Bisnis Statistik	2,47	2,86	2,89	2,44	2,59	2,38	2,58
Domain Kelembagaan	2,32	2,80	2,83	2,28	2,50	2,20	2,48
Domain Statistik Nasional	2,20	2,37	2,40	2,00	2,60	2,12	2,35

11.2 Pencapaian Indikator Indek Penyelenggaraan Statistik Sektor al Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir

Kegiatan statistik sektoral yang dinilai pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir adalah:

- Kompilasi Data Statistik Pertanian dan Peternakan Kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2023.
- Kompilasi Data Statistik Sektoral Kabupaten Indragiri Hilir, Tahun 2023.

Tabel 3. 53 Nilai Indeks Pembangunan Statistik Dan Nilai Indeks Domain

Domain (1)	Bobot (2)	Nilai Harapan (3)	Nilai Nasional (4)	Nilai Hasil Penilaian (5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	2,50
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	1,90
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	2,32
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	2,39
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	2,66
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	2,35	2,32

Tabel 3.54 Capaian Indeks Pembangunan Statistik

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023*)		Capaian (%)	Tahun 2024		Capaian (%)
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
	Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	-	1.60	-	2.6	2.32	89,23

Sumber : **Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Stati**

Catatan : *) uji coba

Dari tabel 11.2 di atas yaitu capaian Indeks Pembangunan Statistik pada tahun 2024 target realisasinya hanya sebesar 2,32 point dengan predikat Cukup dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 2,60 point dengan capaian kinerja hanya sebesar 89,23 %, dengan demikian masih ada kekurangan sekitar 0,28 point lagi untuk memenuhi target pada tahun 2024.

11.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Masih dari tabel 11.2, jika dibandingkan target realisasi Indeks Pembangunan Statistik pada tahun 2023 dengan tahun 2024 terlihat bahwa target realisasi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,72 point dengan nilai target realisasi pada tahun 2024 sebesar 2,32 point sedangkan target realisasi pada tahun 2023 hanya sebesar 1,60 point.

Berdasarkan Permenpan RB No. 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 25 tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2023 bahwa Indeks Pembangunan Statistik (IPS) belum masuk ke dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) maupun Bupati Kabupaten Indragiri Hilir. Oleh sebab itu pada tahun 2023 tidak terdapat

target IPS di Kabupaten Indragiri Hilir. Realisasi IPS diterbitkan oleh BPS semata-mata untuk uji coba.

11.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Solusi yang Telah Dilakukan

11.4.1 Berdasarkan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Evaluasi Sektoral tahun 2024

Kepala Badan Pusat Statistik, untuk pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut :

1. Domain Prinsip Satu Data Indonesia **Keunggulan:**

- Penerapan Prinsip Satu Data Indonesia pada Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sudah diterapkan dengan baik. Sudah terdapat dokumen kebijakan berupa Peraturan Bupati, yang didalamnya mencakup standar data, metadata, interoperabilitas dan kode referensi, dan/atau data induk.

Kekurangan:

- Penerapan pada aspek Interoperabilitas Data melalui bukti dukung yang ada, belum menunjukkan kelengkapan terhadap penerapan dan pemanfaatan *API* pada data statistik di lingkup Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

Rekomendasi:

- Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir perlu menyusun dokumen kebijakan yang mengatur teknis operasional penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang berlaku untuk seluruh produsen data.
- Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir perlu membuat jadwal kegiatan reviu, dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan prinsip SDI serta melakukan tindak lanjut dari hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas secara berkesinambungan.

2. Domain Kualitas Data

Keunggulan

- Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir belum memiliki keunggulan pada Domain Kualitas Data, karena seluruh aspek belum mencapai predikat Baik dan seluruh indikator belum ada yang mencapai tingkat kematangan Terdefinisi.

Kekurangan:

- Penerapan aspek Relevansi, Akurasi, Aktualitas dan Ketepatan Waktu, dan Aksesibilitas sudah dilakukan oleh seluruh produsen data, tetapi masih sesuai standar masing-masing. Tidak ditemukan dokumen kebijakan yang relevan.

Tabel 3. 55 Sasaran Strategis Indeks Pembangunan Statistik Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisien
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Data Statistik Sektoral	2.60	2.32	89,23%	Rp.319.947.000	Rp.168.459.500	52,65%	20% (40,99%)

Dari hasil pengukuran yang dilakukan pada tabel di atas, diketahui pada sasaran strategis 11 (sebelas) tingkat efisiensi dari seluruh indikator kinerja sasaran adalah sebesar 20%. Hal ini mengindikasikan bahwa capaian kinerja pada sasaran strategis 11 (sebelas) beserta alokasi anggarannya telah **efisien**.

3.3 Akuntabilitas Anggaran Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2024 sebesar **Rp. 2.291.450.524.677- (Dua Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Miliar Empat Ratus Lima Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)**. Berpedoman pada proyeksi indikator ekonomi dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, maka strategi-strategi kebijakan fiskal Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 diarahkan kepada :

1. Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional.
2. Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD dari sisi belanja.

3. Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang bersumber dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan.
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan strategi kebijakan fiskal tersebut, maka kebijakan umum keuangan atau anggaran diarahkan dalam tiga fungsi utama, yaitu :

1. Fungsi alokasi, adalah penganggaran untuk kegiatan pembangunan yang tidak mungkin dilaksanakan oleh masyarakat atau swasta karena bersifat publik service seperti penanganan prasarana dasar dan penyediaan infrastruktur.
2. Fungsi distribusi, adalah penganggaran diarahkan untuk pemerataan, keadilan sosial, dan mengurangi kesenjangan, yang antara lain meliputi penanganan masalah kemiskinan pengembangan wilayah tertinggal dan lainnya.
3. Fungsi stabilisasi, yaitu penganggaran diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, perluasan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat serta stabilitas keamanan dan ketertiban.

Upaya-upaya efektif dalam penggalan sumber-sumber pendapatan daerah harus terus dilakukan tanpa harus menambah beban bagi masyarakat sehingga nantinya pendapatan daerah tidak lagi harus bergantung pada satu atau dua jenis pajak daerah saja, diverifikasi sumber pendapatan daerah menjadi mutlak dicari agar ketergantungan dan resiko dapat disebar, mengingat struktur ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir lebih banyak di dominasi oleh sektor primer, maka sudah saatnya dirancang berbagai tindakan yang dapat menggali sumber-sumber pendapatan daerah yang berbasiskan pada sektor primer dan mata rantainya. Pendapatan Daerah dikelompokkan ke dalam **Pendapatan Asli Daerah**, **Pendapatan Transfer**, dan **Lain-Lain Pendapatan Yang Sah** yang masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 56 Struktur APBD Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	2.291.450.524.677
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	233.222.088.268
4.2.	Pendapatan Transfer	1.924.639.022.606

Kode Rekening	Uraian	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	133.589.413.803
5	BELANJA	2.554.861.110.874
5.1	Belanja Operasi	1.927.165.378.260
5.2	Belanja Modal	298.237.706.683
5.3	Belanja Tidak Terduga	16.348.489.531
5.4	Belanja Transfer	313.109.536.400
6	PEMBIAYAAN	397.000.000.000

Kinerja sasaran yang dicapai pada tahun 2024 didukung oleh pelaksanaan program /kegiatan baik yang berdampak langsung maupun tidak langsung. Secara umum, pelaksanaan program / kegiatan untuk masing-masing sasaran dapat berjalan dengan baik. Dukungan anggaran belanja langsung maupun tidak langsung pada tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

BAB IV PENUTUP



4.1 Kesimpulan

Laporan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Bupati Kabupaten Indragiri Hilir berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2024 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Laporan ini menggambarkan hasil evaluasi kinerja dengan fokus pada sasaran yang ditetapkan pada Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026

Kinerja pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir diukur berdasarkan penilaian terhadap indikator Kinerja sasaran strategis yang disusun sebagai mana tercantum di dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026. Penilaian dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target yang telah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian target Kinerja menjadi tolok ukur dari keberhasilan pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dari hasil analisis isu-isu strategis menghasilkan 11 (sebelas) sasaran strategis dan 16 (enam belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator-Indikator Ini Ditetapkan pada setiap Sasaran Pembangunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024-2026. Ikhtisar capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

Sasaran 1 : “Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat”, pada tahun 2024 dengan Indikator Indeks Kesehatan memperoleh capaian kinerja sebesar 107,47% dengan prediket Sangat Tinggi

Sasaran 2 : “Meningkatnya Kualitas Dan Daya Saing Pendidikan Masyarakat”, pada tahun 2024 dengan indikator kinerja indeks Pendidikan memperoleh capaian kinerja sebesar 100,17% dengan prediket sangat tinggi

Sasaran 3 : “Meningkatnya Pendapatan Masyarakat pada tahun 2024 dengan indikator indeks pengeluaran memperoleh capaian kinerja sebesar 102 % dengan prediket sangat tinggi

Sasaran 4 : “Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran” pada tahun 2024 memperoleh rata-rata kinerja 87,03% dengan indikator kinerja

1. Tingkat Kemiskinan
2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Sasaran 5 : “Meningkatnya Produktivitas Sektor Perekonomian Ungulan Daerah” pada tahun 2024 memperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 53,45% dengan indikator kinerja.

1. LPE Kategori Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan
2. LPE Kategori Industry Pengelolaan

Sasaran 6 : “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Ketahanan Bencana” pada tahun 2024 memperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 96,67% dengan indikator kinerja.

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
2. Indeks Risiko Bencana

Sasaran 7 : “ Meningkatkan Kualitas Dan Pemerataan Infrastruktur” pada tahun 2024 dengan indikator kinerja Indeks Infrastruktur memperoleh capaian kinerja sebesar 87,48% atau prediket Tinggi

Sasaran 8 : “ Meningkatkan Profesionalitas ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah” pada tahun 2024 memperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 111,62% pada indikator kinerja

1. Nilai AKIP
2. Indeks Profesionalitas ASN

Sasaran 9 : “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah” pada tahun 2024 memperoleh rata-rata capaian kinerja sebesar 83,85% dengan Prediket Tinggi pada indikator kinerja

1. Indeks Integritas
2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Sasaran 10 : “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik” pada tahun 2024 dengan indikator kinerja Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik memperoleh capaian kinerja sebesar 96,71%. Dengan Prediket Sangat Tinggi

Sasaran 11 : “ Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Data Statistik Sektoral” pada tahun 2024 dengan indikator kinerja Indeks Pembangunan Statistik memperoleh capaian kinerja sebesar 82,23% atau prediket Tinggi

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Pemerintah Perubahan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 ditetapkan 11 (sebelas) sasaran dengan 16 (enam belas) indikator, hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran tersebut adalah sebagai berikut:

❖ Terdapat **10 (spuluh)** atau **54,30%** Indikator Kinerja kategori **sangat tinggi** , yaitu:

- 11) Indeks Pendidikan
- 12) Indeks Kesehatan
- 13) Indeks Pengeluaran
- 14) Tingkat Kemiskinan
- 15) Indeks Lingkungan Hidup
- 16) Indeks Resiko Bencana
- 17) Nilai AKIP
- 18) Indeks Profesional ASN
- 19) Indeks Integritas
- 20) Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik

❖ Terdapat **4 (empat)** atau **16,02%** Indikator Kinerja kategori **Tinggi** , yaitu:

- 5) Tingkat Pengangguran Terbuka
- 6) LPE Industri Pengelolaan
- 7) Indeks Infrastruktur
- 8) Indeks Pembangunan Statistik

❖ Terdapat **1 (satu)** atau **62,05 %** indikator kinerja kategori **sedang** , yaitu :

- 2) Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

❖ Terdapat **1 (satu)** atau **1,05 %** indikator kinerja kategori **sangat rendah** , yaitu:

- 2) LPE Pertanian, Kehutanan dan Perikanan

Berkenaan dengan ketercapaian indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan sebagaimana diatas, yang dituangkan dalam perjanjian kinerja Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024 dapat dipenuhi sesuai harapan dengan total tingkat persentase ketercapaian sebesar 91,69 % atau kategori Sangat Tinggi.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP, Kementerian PANRB perlu melakukan pra-eval evaluasi sebagai salah satu tahapan evaluasi SAKIP kepada instansi pemerintah pada tahun 2024.

Pelaksanaan pra-evaluasi ini perlu didukung dengan kelengkapan dokumen dan informasi yang memadai agar hasil pra-evaluasi dapat menggambarkan kondisi instansi pemerintah secara utuh. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah menyusun Matrik Tindak lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 dari Rekomendasi sebagai berikut :

1. Menyampaikan PK dan rencana akses seluruh PD mulai dari level tertinggi sampai level terendah untuk memastikan penjabaran kinerja yang mendukung pencapaian kinerja organisasi;
2. Melakukan reviu dan perbaikan penjejangan kinerja dari jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan *logical framework* dan CSF dalam mencapai tujuan dan sasaran pemda, selanjutnya, memanfaatkan hasil penjejangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan;
3. Melakukan reviu dan perbaikan dokumen perencanaan baik pada pemda maupun PD dengan memastikan bahwa rumusan tujuan dan sasaran strategis yang dikawal telah berorientasi hasil atau berdampak langsung kepada masyarakat (*result oriented*) serta memiliki indikator yang memenuhi kriteria yang **SMART** (*Specific Measurable Achievable Relevant And Time Bound*) dan **cukup** untuk mengawal pencapaian kinerja. Selanjutnya memastikan sasaran dan indikator kinerja tersebut sesuai dengan level jabatannya serta sesuai dengan karakteristik/tugas organisasi;
4. Menyusun pedoman perencanaan sebagai panduan dalam menyusun perencanaan daerah

5. Mereviu kembali rencana aksi yang disusun pada sebagian PD dengan memastikan seluruh kerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk mencapai kinerja tersebut;
6. Menetapkan IKU pada level PD yang dilengkapi dengan defnisi operasional, sumber data dan formulasi perhitungan yang tepat serta menjadikan KU tersebut sebagai dasar penyusunan perencanaan kinerja;
7. Pemantauan kinerja organisasi agar dilakukan secara *real time* menggunakan teknologi informasi;
8. Hasil pengukuran kinerja agar dimanfaatkan menjadi salah satu aspek penentu dalam memberikan *reward and punishment*;
9. Mendorong pelaksanaan pemantauan dan evaluasi capaian kinerja agar tidak hanya berfokus pada anggaran, namun juga pada kinerja. Sehingga ketercapaian kinerja dan konsistensi antara perencanaan, pengukuran, dan capaian kinerja dapat terjaga dengan baik;
10. Meningkatkan kualitas LPPD dan laporan kinerja PD dengan memastikan keandalan dalam pengolahan dan analisis data kinerja, serta menyajikan analisis secara mendalam tentang factor-faktor yang mempengaruhi ketercapaian/tidak tercapainya kinerja tahun-tahun sebelumnya, dan analisis efesiensi penggunaan sumber daya;
11. Menggunakan informasi laporan kinerja sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam perbaikan perencanaan kinerja dan penetapan target kinerja tahun berikutnya;
12. Menyusun pedoman evaluasi internal akuntabilitas kinerja yang mengacu pada peremenPANRB No 88 tahun 2021 sebagai panduan dalam melakukan evaluasi;
13. Meningkatkan kualitas laporan hasil evaluasi AKIP dengan menyajikan temuan dan rekomendasi yang menggambarkan kekurangan dan solusi yang harus dilakukan pada seluruh aspek untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di setiap PD;
14. Membuat kebijakan *reward and punishment* atas hasil evaluasi AKIP internal sehingga mampu mendorong peningkatan impementasi SAKIP di level PD;
15. Meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal agar mampu menggunakan instrument evaluasi secara maksimal, menerapkan *professional judgement* secara tepat memberikan simpulan hasil evaluasi yang

menggambarkan kondisi *real* penerapan SAKIP setiap PD sehingga rekomendasinya dapat memacu perbaikan akuntabilitas kinerja PD;

Dengan demikian penerapan manajemen kinerja upaya yang dilakukan di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan diharapkan adanya Komitmen Pimpinan dalam memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dan menindak lanjuti rekomendasi yang telah sampaikan.

Tembilahan, Maret 2025

Bupati Indragiri Hilir



Program	Anggaran
36. Program Pengembangan Instrumen, Metode Dan Otomatisasi (P3I)	Rp. 1.106.811.885
37. Program Pengelolaan Data Pengembangan Sistem Pemeliharaan Air Minum	Rp. 1.292.097.870
38. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp. 112.791.270
39. Program Pengelolaan Dan Uji Tinja Air (P3TA)	Rp. 19.209.840.504
40. Program Pengembangan Damsak	Rp. 4.549.550.995
41. Program Pengembangan Dan Uji Daya Mandiri	Rp. 1.590.645.700
42. Program Pengembangan, Pengembangan Dan Aplikasi Pengembangan Jurnal	Rp. 1.297.895.089
43. Program Pengembangan Dan Pengembangan Biologi	Rp. 27.596.751.008
44. Program Pengembangan Pengembangan	Rp. 4.549.550.995
45. Program Pengelolaan Kuesioner Damsak	Rp. 337.596.011.613
46. Program Pengelolaan Pendidikan Damsak	Rp. 3.796.641.792
47. Program Pengembangan Instrumen Dan Instrumen Rata	Rp. 17.410.127.800
48. Program Pengelolaan Aplikasi Instrumen Rata	Rp. 12.479.050.102
49. Program Aplikasi Dan Pengembangan Rata	Rp. 12.764.050.107

Teknikologi, 10 Januari 2024



P. D. 10/1/2024/111

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Adapun prestasi dan penghargaan yang didapatkan oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2024, diantaranya:

1. Tanggal 30/01/2024 Asisten III Inhil Wakili Pemkab Inhil Raih Dua Penghargaan Dalam Ajang KN Awards 2024



2. Tanggal 27/02/2024 Pj Bupati yg di wakili Sekda Inhil Terima menerima Penghargaan kategori sangat baik dalam pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Tahun 2023



3. Tanggal 18/12/2023 Asisten I Wakili Pemkab Inhil Raih Penghargaan KabupatenKota Peduli



4. Tanggal 18/12/2023 Asisten I Wakili Pemkab Inhil Raih Penghargaan KabupatenKota Peduli



5. Penghargaan UHC Award (Universal Health Coverage) dari Wakil Presiden RI



6. Tanggal 19/01/2024 Pj Bupati Inhil Raih penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2022 kategori Madya yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI (3)

